

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI**



**KOMPOSISI PENGELUARAN PUBLIK TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2010-2014 DALAM
MENDORONG GOOD GOVERNANCE (STUDI EMPIRIS 18
PROPINSI DI INDONESIA)**

AGUS TRI BASUKI, SE.,MSi.

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2017**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Penelitian
KOMPOSISI PENGELUARAN PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2010-2015 DALAM MENDORONG GOOD GOVERNANCE (STUDI EMPIRIS 18 PROPINSI DI INDONESIA)

2. Ketua Peneliti
a) Nama lengkap : Agus Tri Basuki, SE., MSi.
b) Bidang keahlian : Ekonomi Regional
c) Jabatan Struktural : -
d) Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e) Unit kerja : Fakultas Ekonomi UMY
f) Alamat surat : Perum. GKP C 6 Mejing Lor
Ambarketawang Gamping Sleman
g) Telpon/Faks : 082221147907
h) E-mail : agustribasuki@yahoo.com

3. Obyek Penelitian
Pertumbuhan ekonomi di 18 propinsi di Indonesia

4. Dana Penelitian : Rp. 20.000.000,-

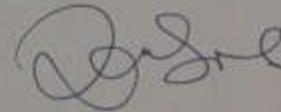
5. Lokasi Penelitian : Indonesia

6. Hasil yang ditargetkan : Model dan Kebijakan

7. Institusi yang terlibat : -

Yogyakarta, Agustus 2017

Peneliti



Agus Tri Basuki, SE., MSi
NIK 143 014

Mengetahui
Kaprodik IE



Dr. Imamudin, MSi
NIK. 143 022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi sering dilihat sebagai *'holy grail'* kebijakan ekonomi. penekanan sederhana ini pada pertumbuhan ekonomi sering dikritik karena keterbatasan pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan standar hidup. Beberapa menyarankan indikator ekonomi tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi harus dilihat faktor lain seperti mengukur pembangunan ekonomi melalui langkah-langkah seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terlihat pada PDB, tetapi juga statistik seperti standar keaksaraan dan perawatan kesehatan. Beberapa juga berpendapat kita tidak harus menggunakan GDP tetapi misalnya indeks kebahagiaan. Di satu sisi Pertumbuhan ekonomi juga memiliki keterbatasan dalam meningkatkan standar hidup. Tergantung pada distribusi pendapatan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi kemiskinan di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan eksternalitas negatif seperti polusi, tingkat kejahatan tinggi dan kemacetan yang benar-benar mengurangi standar hidup. Pertumbuhan ekonomi mungkin bertentangan dengan lingkungan. misalnya pemanasan global. Hal ini tergantung pada apa yang dihasilkan. Uni Soviet memiliki harga fantastis pertumbuhan ekonomi, namun, seringkali melalui menghasilkan baja banyak dan pig iron itu tidak benar-benar sangat berguna.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator dalam melihat pembangunan ekonomi suatu negara. Harus kita sadari walaupun pertumbuhan ekonomi memiliki keterbatasan, tetapi sampai saat ini pertumbuhan ekonomi masih sangat penting karena : (1) Mengurangi Kemiskinan. Pertumbuhan tidak selalu

mengurangi kemiskinan. Tapi, tanpa pertumbuhan ekonomi sangat sulit untuk membuat pengurangan yang berarti dan berkelanjutan dalam kemiskinan. Hal ini terutama penting dalam mengembangkan ekonomi. (2) Mengurangi Pengangguran. Sebuah ekonomi stagnan mengarah ke tingkat yang lebih tinggi dari pengangguran dan penderitaan sosial. (3) Defisit anggaran. Resesi yang mendalam telah menyebabkan kenaikan yang sesuai pada defisit anggaran. Pertumbuhan ekonomi adalah penting untuk meningkatkan defisit anggaran pemerintah. (4) Standar Hidup. Jika dikelola dengan benar, pertumbuhan ekonomi memungkinkan peningkatan sumber daya untuk pelayanan publik penting seperti pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan peningkatan belanja sosial tanpa peningkatan tarif pajak.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asean dapat kita lihat dalam tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1: Pertumbuhan PDB atas Dasar Harga Konstan di Negara-negara ASEAN, 1998–Q1 2014 (y-o-y, %)

Negara	1998-1999 Era Krisis Asia	2000-2007 Era Tumbuh Stabil	2008-2009 Era Krisis Global	2010	2011	2012	2013	Q1 2014
Brunei D	1,25	2,24	-1,85	2,6	2,2	1,6	-1,8	-3,3
Kamboja	8,5	9,93	3,4	6,1	7,1	7,2	7,3	7,2
Indonesia	-6,15	5,04	5,3	6,2	6,5	6,2	5,78	5,21
Laos	4,25	6,75	7,65	8,1	8	8,1	7,9	7,6
Malaysia	-0,65	5,5	1,65	7,1	5,1	5,6	6,8	6,2
Myanmar	8,35	12,88	4,35	5,3	5,4	6,3	6,7	6,5
Filipina	1,25	4,88	2,65	7,6	3,9	6,5	7,2	5,7
Singapore	2,05	6,36	0,5	14,8	5,1	1,2	3,7	4,9
Thailand	-3,05	5,05	0,1	7,8	-0,1	6,4	2,9	-2,1
Vietnam	5,3	7,64	5,8	6,8	5,9	5	5,42	4,96
Asean	-1,9	5,56	3,85	8,3	4,9	5,2	5,1	4,3

Catatan: rata-rata pertumbuhan untuk periode 1998-1999, 2000-20007, dan 2008-2009

Data Pertumbuhan Q2/2014: Kamboja, Laos dan Myanmar belum tersedia

Sumber: IMF, CEIC (2014)

Pertumbuhan ekonomi tahun 1998-1999 di negara Asean hampir semua negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, dan negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi terendah adalah Indonesia (tumbuh -6,15%) dan negara yang tumbuh spektakuler adalah Kamboja dan Myanmar (8,5% dan 8,35%). Pada masa era stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dibawah rata-rata Asean yaitu dibawah 5,56 persen atau Indonesia rata-rata tahun 2000 hingga 2007 hanya tumbuh 5,04 persen dan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Myanmar yaitu sebesar 12,88 persen, sedangkan terendah dicapai oleh Brunei Darusallam yang hanya tumbuh 2,4 persen. Sedangkan pada era krisis global tahun 2008-2009 Indonesia tumbuh diatas rata-rata Asean atau tumbuh 5,3 persen diatas 3,85 persen. Negara yang mengalami dampak krisis global di Asean adalah Brunai Darusallam yang tumbuh -1,85 persen. Dan tahun 2010-2014 rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh antara 5,78 hingga 6,5 persen yang tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Asean 4,3 persen dingga 8,3 persen.

Sedangkan jika kita tinjau pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Indonesia (34 propinsi) seperti yang kita lihat dalam tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi 34 Propinsi di Indonesia
Tahun 2011 hingga 2015 (2010=100)

Provinsi	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	3.28	3.85	2.61	1.55	-0.72
Sumatera Utara	6.66	6.45	6.07	5.23	5.10
Sumatera Barat	6.34	6.31	6.08	5.86	5.41
Riau	5.57	3.76	2.48	2.70	0.22
Jambi	7.86	7.03	6.84	7.35	4.21
Sumatera Selatan	6.36	6.83	5.31	4.70	4.50

Provinsi	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Bengkulu	6.85	6.83	6.07	5.48	5.14
Lampung	6.56	6.44	5.77	5.08	5.13
Kep. Bangka Belitung	6.90	5.50	5.20	4.67	4.08
Kep. Riau	6.96	7.63	7.21	6.62	6.02
DKI Jakarta	6.73	6.53	6.07	5.91	5.88
Jawa Barat	6.50	6.50	6.33	5.09	5.03
Jawa Tengah	5.30	5.34	5.11	5.28	5.44
DI Yogyakarta	5.21	5.37	5.47	5.16	4.94
Jawa Timur	6.44	6.64	6.08	5.86	5.44
Banten	7.03	6.83	6.67	5.47	5.37
Bali	6.66	6.96	6.69	6.73	6.04
Nusa Tenggara Barat	-3.91	-1.54	5.16	5.06	21.24
Nusa Tenggara Timur	5.67	5.46	5.41	5.05	5.02
Kalimantan Barat	5.50	5.91	6.05	5.03	4.81
Kalimantan Tengah	7.01	6.87	7.37	6.21	7.01
Kalimantan Selatan	6.97	5.97	5.33	4.85	3.84
Kalimantan Timur	6.47	5.48	2.76	1.57	-1.28
Kalimantan Utara	-	-	-	8.18	3.13
Sulawesi Utara	6.17	6.86	6.38	6.31	6.12
Sulawesi Tengah	9.82	9.53	9.59	5.07	15.56
Sulawesi Selatan	8.13	8.87	7.62	7.54	7.15
Sulawesi Tenggara	10.63	11.65	7.50	6.26	6.88
Gorontalo	7.71	7.91	7.67	7.27	6.23
Sulawesi Barat	10.73	9.25	6.93	8.88	7.37
Maluku	6.34	7.16	5.24	6.61	5.44
Maluku Utara	6.80	6.98	6.36	5.48	6.10
Papua Barat	3.64	3.63	7.36	5.44	4.10
Papua	-4.28	1.72	8.55	3.81	7.97
Indonesia	6,08	6,26	6,10	5,51	5,70

Sumber : Biro Pusat Statistik, Statistik Indonesia, tahun 2011-2015

Jika kita perhatikan tabel 1.2 dari tahun 2011 hingga 2015 rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh antara 5,51 persen hingga 6,26 persen. Propinsi yang ikut andil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 adalah Sulawesi Barat (tumbuh 10,73%), Sulawesi Tenggara (tumbuh 10,63%) dan Sulawesi Tengah (tumbuh 9,83%), sedangkan kontribusi terendah Nusa Tenggara Barat (tumbuh -3,91%) dan Papua (tumbuh -4,28%).

Tahun 2012 kontribusi terbesar dalam mendukung ekonomi Indonesia adalah Sulawesi Tenggara (tumbuh 11,65%), Sulawesi Tengah (tumbuh 9,53%) dan Sulawesi Barat (tumbuh 9,25%), sedangkan kontribusi terendah Nusa Tenggara Barat (tumbuh -1,54%) dan Papua (tumbuh 1,72%).

Tahun 2013 kontribusi terbesar dalam mendukung ekonomi Indonesia adalah Sulawesi Tengah (tumbuh 9,59%), Papua (tumbuh 8,55%) dan Sulawesi Selatan (tumbuh 7,63%), sedangkan kontribusi terendah Riau (tumbuh 2,48%), Aceh (tumbuh 2,61%) dan Kalimantan Timur (tumbuh 2,76%).

Tahun 2014 kontribusi terbesar dalam mendukung ekonomi Indonesia adalah Sulawesi Barat (tumbuh 8,8%), Kalimantan Utara (tumbuh 8,18%) dan Sulawesi Selatan (tumbuh 7,54%), sedangkan kontribusi terendah Aceh (tumbuh 1,55%), Kalimantan Timur (tumbuh 1,57%) dan Riau (tumbuh 2,7%).

Tahun 2015 kontribusi terbesar dalam mendukung ekonomi Indonesia adalah Nusa Tenggara Barat (tumbuh 21,24%), Sulawesi Tengah (tumbuh 15,56%) dan Papua (tumbuh 7,97%), sedangkan kontribusi terendah Aceh (tumbuh -0,72%), Kalimantan Timur (tumbuh -1,28%), dan Riau (tumbuh 0,22 %).

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat mengapa propinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tumbuh dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,

seperti propinsi Aceh, propinsi Kalimantan Timur, propinsi Riau dan propinsi Papua. Dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan sebagian propinsi mengalami keterlambatan ekonomi di bandingkan propinsi lainnya.

Salah satu sasaran pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, termasuk didalamnya pemerataan pendapatan antar daerah (wilayah). Untuk mencapai sasaran di atas bukanlah pekerjaan ringan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimilikinya.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan (RPJMN 2014-2019).

Penjabaran TRISAKTI (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) diwujudkan dalam bentuk:

1. **Kedaulatan dalam politik** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

2. **Berdikari dalam ekonomi** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
3. **Kepribadian dalam kebudayaan** diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa dan kelemahan sendi perekonomian bangsa.

Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud (*tangible*) maupun bersifat non-fisik (*intangible*), bagi kesejahteraan rakyatnya. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa

menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan krisis energi akibat dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya cadangan minyak nasional.

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat lokal, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggunakan sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat banyak dan mendorong perekonomian untuk maju.

Pengantaran prioritas kegiatan pembangunan dari proses perencanaan ke dalam proses penganggaran adalah suatu kelanjutan (Bastian, 2006). Pada UU Nomor 25 tahun 2004 pasal 8 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yaitu : (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksana rencana, dan (4) evaluasi pelaksana rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga akan menjadi satu siklus perencanaan yang utuh terbentuk. Pencapaian kinerja dari satu tahap pelaksanaan rencana dievaluasi untuk menjadi pertimbangan dan penganggaran tahun berikutnya, sehingga penganggaran menjadi wajar dan berbasis kinerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyusunan APBD ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Bastian, 2006). *Fungsi otorisasi* berarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. *Fungsi perencanaan* berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. *Fungsi pengawasan* berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggara pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian. Dan terakhir *fungsi stabilisasi* berarti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selain dengan perencanaan dan pengawasan APBN/APBD dalam mempengaruhi kondisi perekonomian, investasi juga dapat diandalkan untuk menciptakan strategi pembangunan menguatkan sendi-sendi perekonomian nasional (Presiden Jokowi mengidentifikasi ada tiga problem pokok bangsa yang dihadapi saat ini salah satunya adalah melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional).

Arsyad (2004) menjelaskan bahwa setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif

membangun daerah. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada berupaya menginventarisasi potensi sumber daya yang ada untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa investasi merupakan pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi, namun digunakan untuk kegiatan produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa di masa yang akan datang.

Sebagian ahli ekonomi memandang bahwa pembentukan investasi merupakan motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu irri. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka ada sejumlah modal yang ditanam atau dikeluarkan, atau ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi, sehingga menghasilkan barang dan jasa dalam meningkatkan produk domestik bruto.

Hasil penelitian Robert J. Barro, 1991, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan berhubungan dengan saham publik investasi. Kevin Sylwester, 2000, Peningkatan tingkat modal manusia tidak memiliki hubungan positif, dan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan. Rock-Antoine Mehanna, bahwa keterbukaan perdagangan merangsang investasi, yang pada gilirannya memacu pertumbuhan. Sri Nawatmi, 2013, investasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara umum pemerintah memainkan peranan penting dalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah secara praktis akan mempengaruhi aktivitas perekonomian, bukan hanya karena pengeluaran pemerintah dapat menciptakan proses pembangunan, tetapi juga sebagai salah satu komponen agregat demand yang dapat menambah produk.

Hasil penelitian Suleiman A.S. Aruwa, 2012, ada hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan PDRB, dan pengeluaran dan pendapatan publik untuk kasus Nigeria. Model Vector Error Correction Model yang digunakan menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB dan pendapatan menyebabkan pertumbuhan pengeluaran publik. Hendarmin, 2013, Pengaruh Belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah bertanda positif tapi tidak signifikan, Ndari Sujaningsih, dkk, 2012, terdapat hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap output dalam jangka panjang.

Perdebatan tentang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan masih berjalan sampai sekarang. Ekonom, sejarawan dan para ahli politik telah terlibat dalam debat yang panjang tentang apakah korupsi membahayakan pertumbuhan ekonomi. Pandangan umum menyatakan bahwa korupsi mengganggu aktivitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian.

Hasil penelitian Paolo Mauro, 1995, Korupsi dapat menurunkan investasi, sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kwabena Gyimah-Brempong, 2002, korupsi mengurangi tingkat pertumbuhan pendapatan. Peningkatan satu unit indeks korupsi mengurangi tingkat pertumbuhan PDB antara 0,75 dan 0,9 poin persentase, dan pendapatan per kapita antara 0,39 dan 0,41 poin persentase; efek relatif besar mengingat lambatnya pertumbuhan ekonomi di Afrika. Korupsi menurunkan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita secara langsung dengan menurunkan produktivitas sumber daya yang ada dan secara tidak langsung melalui pengurangan investasi. Sri Nawatmi, 2013, Korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kesungguhan pemerintah dalam membangun daerah ini diukur dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah Otonomi daerah. Untuk

mendukung hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang 22 Nomor Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang lebih besar (*local discretion*) kepada daerah untuk merancang berbagai program pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat setempat (*local needs*).

Dari latar belakang diatas peneliti sangat tertarik menganalisis faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi di beberapa propinsi di wilayah Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan peranan pengeluaran pemerintah daerah terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, Kelautan dan Perikanan, pertanian, dana alokasi umum, jumlah penduduk dan penanaman modal asing, serta opini BPK terhadap LKPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan efektivitas dan keselarasan dalam pembangunan ekonomi daerah, serta terciptanya *good governance*.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya maka perumusan masalah penelitian tentang Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2014 di beberapa Propinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
4. Apakah Pengeluaran Pemerintah untuk Kelautan dan Perikanan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
5. Apakah Pengeluaran untuk Pertanian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
6. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
7. Apakah Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
8. Apakah Opini BPK terhadap LPKD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi tahun 2010-2014 di beberapa Propinsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

2. Ingin mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
3. Ingin mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
4. Ingin mengetahui pengaruh Pengeluaran Kelautan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
5. Ingin mengetahui Pengeluaran untuk Pertanian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
6. Ingin mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
7. Ingin mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
8. Ingin mengetahui pengaruh Opini BPK terhadap LPKD terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa kegunaan sebagai berikut :

1. Secara umum dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fundamental ekonomi makro di beberapa wilayah di Indonesia khususnya pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi dan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Secara teoritis dapat menjadi bahan referensi untuk pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang perencanaan dan pembangunan ekonomi sekaligus dapat

menjadi acuan/referensi bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

3. Secara praktis menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan dan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan masalah pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, investasi dan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

E. Kebaharuan Studi

Ulasan tentang kajian pustaka yang membahas acuan teori yang digunakan serta penelusuran terhadap hasil-hasil studi empiris terdahulu merupakan salah satu rangkaian proses penelitian untuk mengetahui sejauh mana studi-studi sebelumnya telah membahas tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Penelitian yang dilakukan Kevin Sylwester (2000), Rustam A (2013), dan Naftaly Gisore (2014) menyatakan bahwa penambahan penduduk yang dibarengi dengan usaha-usaha peningkatan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan umum akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adela Shera dkk (2014) penambahan penduduk tidak diimbangi dengan usaha-usaha seperti diatas akan menghambat pembangunan ekonomi.

Sebagian besar peneliti seperti Suleiman A.S. Aruwa (2012), Ndari Sujaningsih dkk (2012), Rustam A (2013), Wasiaturrahma (2013), dan Chiawa M.M. dkk (2012) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga ada beberapa peneliti seperti Hendarmin (2012) dan Ergun Dagur dkk (2006) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa anggaran

pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan P Srinivasan (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa anggaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat terjadi karena pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Sebagian besar peneliti menyatakan investasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak ada peneliti seperti Hendarmin (2012) dan Adewara Sunday Olabisi dkk (2012) berpendapat Penanaman modal asing justru menurunkan pertumbuhan ekonomi melalui perjanjian eksklusif di bidang produksi dengan pemerintah dengan tidak melakukan kembali keuntungan yang mereka dapatkan.

Adewara Sunday Olabisi dkk (2012) dan Basem Mohammed Louzi & Abeer Abadi (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penanaman modal asing tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sri Nawatmi (2013), Kwabena Gyimah Brempong (2002), Pak Hung Mo (2001) dan Adela Shera dkk (2014) lebih cenderung berpandangan bahwa korupsi ini justru memperlambat atau menurunkan pertumbuhan ekonomi, di samping juga menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, maka penelitian tentang faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini mencoba untuk meneropong komposisi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah model yang lebih terintegrasi atau lebih komprehensif. Khusus untuk komposisi pengeluaran pemerintah, penulis membagi menjadi alokasi untuk pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian dan dana alokasi umum, penelitian ini mencoba untuk

menambahkan satu variabel lagi yaitu opini Badan Keuangan Pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

TELAAH PUSTAKA, PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang akan dibahas adalah pengertian pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi dan studi empiris yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti tentang pertumbuhan ekonomi.

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam pertumbuhan ekonomi, biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu (Sumitro, 1994). Dalam hubungan ini, ditunjukkan hubungan perimbangan kuantitatif antara sejumlah sarana produksi di satu pihak dengan hasil seluruh produksi di pihak lain. Satu sama lain hal itu dapat dinyatakan dalam kerangka format matematika. Model-model mengenai pertumbuhan ekonomi harus diuji dengan pengukuran empiris-kuantitatif.

Pembangunan mengandung arti yang lebih luas dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi memang merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan. Selain segi peningkatan produksi secara kuantitatif, proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (*allocation*) sumber daya produksi (*productive resources*) di antara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola pembagian

(*distribution*) kekayaan dan pendapatan di antara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan (*instutional framework*) dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Suatu hal yang amat penting dalam proses pembangunan ialah semakin meluasnya kesempatan kerja yang bersifat produktif (*productive employment*). Pembangunan ekonomi seharusnya membawa patisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat produktif untuk semua anggota masyarakat yang ingin berperan serta dalam proses ekonomi. Kegiatan ekonomi yang produktif mengandung berbagai dampak positif, di antaranya menambah pendapatan nyata bagi sebagian besar penduduk. Hal ini dapat meningkatkan daya beli konsumsi secara kualitatif dan kuantitatif.

Menurut Adam Smith (Suryana, 2000:55) pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Todaro (2000) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Menurut Rostow (Suryana, 2000), pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern merupakan proses yang berdimensi banyak. Pembangunan ekonomi menurutnya bukan saja menyangkut perubahan dalam struktur ekonomi, tetapi juga menyangkut proses yang menyebabkan; perubahan orientasi organisasi ekonomi, perubahan masyarakat, perubahan cara penanaman modal, perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan seseorang menjadi ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan pekerjaan dan perubahan masyarakat yang pada mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan

manusia ditentukan oleh alam, selanjutnya berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi keadaan alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan.

Pengertian pembangunan ekonomi menurut Simon Kuznets (Suryana, 2000; 64) adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Boediono (1999:8) menyebutkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang.

Menurut Sadono Sukirno (1996:33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Dari definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi ini mengandung tiga

unsur. (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru; (2) usaha meningkatkan pendapatan per kapita; (3) kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

2. Kerangka Konseptual Penelitian

1) Pendekatan Klasik

Sistem analisis para pemikir Klasik didasarkan pada pendapat seakan-akan perkembangan ekonomi berjalan dalam keadaan pasar bebas dengan persaingan yang sempurna tanpa adanya unsur monopoli. Pemikiran kaum klasik berpangkal tolak dari pengertian fungsi produksi, yaitu mengenai hubungan persamaan antara hasil produksi dengan kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi (Sumitro, 1994). Total produksi Klasik dinyatakan dalam rumus $Y=f(K,L, R,T)$ dimana K adalah jumlah modal (*Capital*), L adalah tenaga kerja (*Labor*), R adalah tanah (sumber daya alam dalam arti luas) dan T adalah Tehnologi.

Pada dasarnya sistem analisis mazhab Klasik berpusat pada proses akumulasi dalam arti pembedaan modal secara kumulatif (modal fisik maupun modal dana). Proses akumulasi terlaksana karena adanya surplus dalam ekonomi masyarakat yang tersedia untuk investasi.

Pokok pemikiran mazhab ini bahwa perkembangan ekonomi bisa berlanjut, namun akan dialami kendala dan batasan yang berkenaan dengan kecenderungan menurunnya imbalan jasa bagi peranan modal maupun peranan tenaga kerja, dua faktor yang bersifat variabel dalam fungsi produksi. Dalam

proses yang dimaksud, perkembangan ekonomi akan menuju keadaan yang bersifat stasioner (*stationary state*).

a) Adam Smith

Adam Smith (1723-1790) sering dianggap sebagai pelopor ekonomi klasik, Dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* (1776) yang menganalisis bagaimana perekonomian sebuah negara bisa tumbuh dan berkembang (Arsyad, 2004; 55, Hakim, 2002; 64, Sukirno, 2006; 244). Menurut Smith variabel penentu proses produksi suatu negara dalam menghasilkan output total ada tiga ; yaitu (1) sumber daya alam yang tersedia, (2) sumber daya manusia dan (3) stok barang kapital yang ada.

Sumber daya alam yang tersedia merupakan bahan baku utama dalam proses produksi suatu negara, jika sumber daya alam telah terkuras habis maka proses produksi akan terhenti dan pertumbuhan ekonomi juga akan berhenti. Sumber daya manusia dalam arti angkatan kerja, tenaga kerja merupakan input dalam proses produksi dan berperan aktif dalam proses pertumbuhan ekonomi. Jumlah dan kualitas akan sangat menentukan dalam proses produksi. Sedangkan stok kapital memegang peran yang sangat penting dalam menentukan cepat lambatnya proses pertumbuhan output.

b) David Ricardo

David Ricardo (1772-1823) mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik menjadi sebuah model pertumbuhan dengan mempertajam konsep mekanisme proses pertumbuhannya. Menurut David Ricardo, di dalam

masyarakat ekonomi terdapat tiga golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin proses produksi dan memegang peranan yang sangat menentukan dalam mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali dalam bentuk akumulasi kapital. Golongan kapitalis sangat tergantung pada golongan kapitalis dan golongan ini terbesar dalam masyarakat. Sedangkan golongan tuan tanah, mereka hanya menerima saja dari golongan kapitalis atas areal tanah yang disewanya (Arsyad, 2004; 58, Hakim, 2002; 68).

Menurut David Ricardo pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh : (1) sumber daya alam (dalam hal ini tanah), (2) perkembangan jumlah penduduk, dan (3) Peran teknologi.

c) Robert Malthus

Pembahasan Malthus menarik perhatian sampai sekarang dan masih relevan bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang yaitu segi institusional yang bersifat sosiologis-ekonomis. Dalam masyarakat di negara-negara maju, termasuk kalangan cendekiawan sering terdapat pandangan seolah-olah keterbelakangan dan kemacetan ekonomi di belahan dunia lain (Amerika latin, Afrika dan Asia) disebabkan oleh perilaku masyarakat sekitar, bahkan malas karena keadaan sumber alam menguntungkan dan memudahkan kehidupan manusia.

Malthus menunjuk kepada kenyataan institusional dalam tata susunan ekonomi masyarakat yang menjadi kendala besar bagi kemajuan rakyat. Keterbelakangan dan kemiskinan penduduk di negara-negara tersebut

bukan disebabkan oleh terbatasnya tanah subur atau semakin kecilnya luas tanah karena perkembangan penduduk ataupun kemalasan penduduk. Tetapi karena tanah yang luas telah dikuasai oleh segelintir orang dari kalangan atas (Sumitro, 1994: 33).

Menurut Malthus ada dua faktor penentu produksi di sektor pertanian, (1) faktor ekonomi (tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi), dan (2) faktor non ekonomi (keamanan dan kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, kerja keras, jujur dan disiplin). Dan diantara faktor-faktor ekonomi yang sangat menentukan adalah faktor akumulasi modal, tanpa akumulasi modal yang diinvestasikan maka proses produksi akan terhenti (Hakim 2002). Yang dapat menyediakan tabungan untuk akumulasi modal adalah pengusaha yang menyisihkan keuntungan dan bukannya penghematan konsumsi para pelaku ekonomi (non pengusaha), karena dampak dari penghematan konsumsi justru menurunkan permintaan efektif dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

2) Pendekatan Neo Keynes

Proses pertumbuhan ekonomi menurut pandangan kaum Neo Keynes diwakilkan oleh teori Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar.

a) Roy F. Harrod

Pola pendekatan Harrod terhadap proses pertumbuhan menunjukkan ciri-ciri pokok pada kerangka analisis Keynes. Perhatian Keynes berkisar pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) termasuk pada penggunaan kapasitas produksi yang terpasang. Persoalan ini sekarang

dipersoalkan oleh Harrod yaitu dalam kondisi seperti apa persyaratan yang dipenuhi dalam proses pertumbuhan yang berlangsung dalam ekuilibrium yang stabil.

Pokok perhatian Harrod berkisar pada pertumbuhan ekonomi yang dapat berlangsung secara terus-menerus dalam pola keadaan ekuilibrium yang stabil. Harrod memaparkan dua konsep pengertian perihal laju pertumbuhan yang menjadi kunci gagasannya, yaitu : (1) laju pertumbuhan produksi dan pendapatan pada tingkat yang dianggap memadai dari sudut para pengusaha; (2) laju pertumbuhan produksi dan pendapatan ditentukan oleh kondisi dasar yang menyangkut ; (a) bertambahnya angkatan kerja karena bertambahnya jumlah penduduk; (b) meningkatnya produktivitas kerja karena kemajuan teknologi. Jadi menurut Harrod pertumbuhan ekonomi yang kontinu dalam kondisi *full employment* dapat terjadi apabila dipenuhi dua syarat tersebut (Sumitro, 1994; Hakim, 2002; Todaro, 2000; Sukirno, 2006).

b) Evsey D. Domar

Gagasan Domar berpangkal pada berlakunya asas *investment multiplier*. Laju pertumbuhan pada permintaan efektif langsung dihadapkan kepada pertumbuhan dan kapasitas produksi. Dalam model Domar diungkapkan bahwa pertumbuhan pada permintaan adalah sama dengan pertambahan investasi (I) dikalikan dengan multiplier (1/s). Sedangkan pertumbuhan kapasitas produksi adalah sama dengan investasi (I) dibagi oleh capital-output rasio (k), sehingga pertumbuhan permintaan adalah sama dengan pertumbuhan kapasitas produksi : $\Delta I/I = s/k$.

Laju pertumbuhan dalam persamaan Domar dianggap sebagai laju pertumbuhan yang kritis yang hampir mirip dengan *warranted rate of growth* dalam model Harrod. Jika investasi melebihi laju pertumbuhan maka penyimpangan tersebut menyebabkan $\Delta I/I$ (yang sama dengan pertumbuhan permintaan) akan lebih meningkat secara nisbi dibandingkan dengan s/k (pertumbuhan pada kapasitas produksi): $\Delta I/I > s/k$. Keadaan ini akan membawa investasi dalam jumlah besar. Selaras dengan gagasan Harrod, jika laju pertumbuhan investasi menyimpang dari laju kritis s/k , laju pertumbuhan pada kapasitas produksi, maka penyimpangan itu cenderung untuk berlangsung terus sehingga diperlukan intervensi kebijakan, jika kecenderungan penyimpangan hendak dikembalikan pada jalur ekuilibrium (Sumitro, 1994; Hakim, 2002; Todaro, 2000).

3) Pendekatan Neo Klasik

Pembahasan tentang teori Neo-Klasik mengenai pertumbuhan ekonomi dibatasi pada pokok-pokok pemikiran yang dikembangkan oleh Robert M Solow, Nicholas Kaldor dan Simon Kuznet.

a) Robert M Solow

Model yang dikembangkan oleh Solow terdapat kemungkinan adanya perubahan pada tingkat bunga maupun tingkat upah. Proses pertumbuhan dilihat sebagai suatu proses yang berlangsung dengan perimbangan-perimbangan variabel diantara faktor-faktor produksi. Harga-harga faktor produksi adalah fleksibel sehingga ada kemungkinan substitusi di antara faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi. Dalam keadaan

dimana jumlah tenaga kerja melebihi pasok modal, harga tenaga kerja (tingkat upah) akan menurun secara nisbi terhadap harga modal (tingkat bunga). Sebaliknya jika pertambahan modal melampau pertambahan jumlah tenaga kerja, maka tingkat upah akan meningkat. Dengan adanya perubahan pada harga faktor-faktor produksi dan melalui substitusi satu jenis faktor produksi oleh jenis faktor produksi lainnya, hal itu satu sama lain dapat membatasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dari ekuilibrium pertumbuhan. Oleh sebab itu tidaklah tepat bila seakan-akan dalam proses pertumbuhan secara inheren terkandung unsur ketidakstabilan sebagaimana ditonjolkan dalam *instability theorem Harrod* (Sumitro, 1994; 44).

b) Nicholas Kaldor

Dalam perkembangan pemikiran Kaldor mengenai masalah pertumbuhan, perhatiannya semakin ditujukan kepada masalah-masalah konkret yang berjalan dalam masa yang panjang, sekitar lima puluh tahun atau lebih. Dalam hubungan ini, Kaldor semakin meninggalkan pola pendekatan yang mengandalkan metodologi berdasarkan model-model ekonomi makro. Pandangan Kaldor tentang proses pertumbuhan jangka panjang diarahkan pada pertumbuhan sektoral yang mencakup sector produksi komoditi primer dan sector skunder (industry dan konstruksi). Sedangkan kegiatan di sector tersier (jasa-jasa) oleh Kaldor dianggap sebagai fungsi dari perkembangan industri.

Kaldor mengadakan perbedaan yang tajam antara pertumbuhan di sector produksi primer dan pertumbuhan di sector industri. Menurut Kaldor ciri pokok dalam industry manufaktur ialah produksinya yang berlangsung

dengan *increasing return*; penerimaan imbalan persatuan produksi meningkat secara nisbi terhadap biaya persatuan produksi. Negara-negara industri sudah mempunyai landasan prasarana beserta perangkat kelembagaan yang cukup memadai. Dalam masyarakat negara-negara itu, asas *increasing return* berlaku baik di bidang mikro (lingkungan usaha) maupun secara makro (masyarakat secara menyeluruh) (Sumitro, 1994; 47)..

Increasing return dan kemajuan teknologi adalah kait mengkait satu dengan lainnya. Dengan begitu, *increasing return* tidak saja merupakan fungsi dan skala produksi, melainkan juga dari produksi kumulatif dalam perkembangan waktu.

Hal yang sama menurut Kaldor, berlaku mengenai kalkulasi modal fisik. Peningkatan produktivitas tenaga kerja secara kontinu memerlukan investasi yang berkenaan dengan mekanisme teknik produksi. Hal ini berarti bertambahnya modal per tenaga kerja. Pertumbuhan industri dalam jangka panjang ditandai oleh meningkatnya hasil produksi per tenaga (*labour productivity*) maupun meningkatnya modal per tenaga kerja (*capital-labour productivity*). Akan tetapi, perubahan pada *capital-output ratio* (nisbah modal terhadap hasil produksi) tidak begitu menonjol. Kaldor menekankan : Investasi bukan menjadi sebab bagi pertumbuhan produksi, melainkan sebaliknya pertumbuhanlah yang memungkinkan pengerahan investasi (Sumitro, 1994).

c) **Simon Kuznets**

Pandangan Kuznets mengenai kegiatan ekonomi masyarakat berpangkal pada kerangka perhitungan nasional dengan penjabarannya tentang

unsur-unsur komponen dalam pendapatan nasional. Kuznets berhasil memberi substansi secara empiris kualitatif terhadap pengertian-pengertian pokok dalam kerangka analisis Keynes seperti mengenai hubungan antara konsumsi – tabungan – investasi – pendapatan dalam tata susunan ekonomi secara keseluruhan (Sumitro, 1994; 53).

Kuznets menekankan bahwa penggunaan metode kuantitatif tidak dapat ditempuh terlepas dari teori dan harus selalu diarahkan dan dikendalikan oleh teori. Memang dua ciri yang menonjol dalam pandangan Kuznets ialah pentingnya arti fakta dan data empiris serta pengetahuan ekonomi berlandaskan pengujian kuantitatif. Namun penafsiran dan penjelasan tentang fakta-fakta dan pendekatan kuantitatif harus berlandaskan teori ekonomi.

Dalam pandangan Kuznets era pertumbuhan tidak hanya ditandai oleh peran industri manufaktur dan konstruksi. Hal yang tidak kurang penting artinya ialah modernisasi teknologi bidang pertanian dan bidang produksi primer pada umumnya. Selain itu, kini semakin menonjol arti dan peranan pemasaran dan teknologi komunikasi. Perkembangan tersebut menyebabkan bahwa pola kegiatan ekonomi modern melintasi batas-batas antar Negara. Sebagai konsekuensi logis dari proses pertumbuhan perekonomian dunia berada pada tahap interdependensi dan globalisasi yang masih terus berlangsung (Suryana, 2000;65).

4) Pendekatan Strukturalisme

a) Arthur Lewis

Kerangka analisis dan garis pemikiran Arthur Lewis pada hakikatnya berpaling pada alam pikiran mazhab Klasik dan sebagian juga (Sumitro,1994;94, Arsyad, 2004;93, Sukirno, 2006; 279), Pertama-tama hal itu berkenaan dengan dalil tentang angkatan kerja yang dianggap sebagai faktor homogen dan tidak mempunyai ketrampilan. Angkatan kerja yang homogen dan tidak trampil itu dianggap bisa bergerak dan beralih yang tiada batasnya. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern, sedangkan ekspansi sektor modern seakan-akan ditentukan oleh faktor eksogen, bisa timbul karena selera konsumen berubah, atau karena langkah kebijakan pemerintah, ataupun karena perubahan pasar internasional. Selain itu, menurut Arthur Lewis akumulasi modal bersumber pada tabungan yang disisihkan dari laba untuk disalurkan kembali sebagai investasi yang produktif.

Salah satu sendi pokok dalam gagasan Arthur Lewis ialah bahwa kelebihan tenaga sektor dari sektor tradisional bisa ditarik atau disalurkan dengan lancar dan hampir secara otomatis ke sektor modern. Pengalaman empiris di negara-negara berkembang menandakan betapa sulitnya menyalurkan sejumlah pengangguran dari sektor tradisional dan mengalihkan secara permanen ke sektor modern (Todaro, 2000).

b) Rosensteins-Rodan

Pandangan Rosensteins-Rodan sudah menyangkut segi strategi dalam pelaksanaan pembangunan. Ia berpangkal tolak pada keadaan stagnasi dalam perekonomian negara-negara berkembang (Sumitro, 1994, hal. 98). Stagnasi yang dimaksud berkaitan dengan sejumlah lingkaran-lingkaran yang tiada berujung pangkal. Salah satu di antaranya ialah bahwa pasar barang dan jasa sangat tidak sempurna. Kenyataan itu berakibat bahwa pasar untuk investasi modal juga tidak sempurna. Investasi tidak hanya mengandung resiko usaha, melainkan juga dihadapkan kepada segala rupa faktor ketidakpastian (*uncertainties*). Dalam keadaan demikian, usaha-usaha yang terpecah dan terpecah-pecah dalam produksi barang konsumsi maupun barang modal tidak akan berdaya untuk membawa masyarakat dari keadaan stagnasi kepada suatu perkembangan yang bisa berlanjutan dengan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu diperlukan usaha investasi pada skala besar yang harus dilakukan secara bersama-sama di berbagai bidang dan ragam kegiatan yang dapat saling melengkapi. Satu sama lain merupakan faktor pendorong yang amat kuat (*Big Push*) untuk mengatasi hambatan dan rintangan yang terkandung dalam stagnasi ekonomi dan untuk membawa sistem ekonomi sebagai keseluruhan ke arah perkembangan yang semakin maju.

Pola pemikiran di atas berpangkal pada apa yang dikenal dalam teori umum sebagai *external economies*. Fenomena *external economies* paling menonjol dalam investasi untuk pembentukan modal masyarakat (*social overhead capital*) berupa infrastruktur ataupun prasarana : jaringan jalan,

jembatan, pelabuhan, tenaga listrik, rumah sakit, gedung sekolah, transportasi dan komunikasi.

Menurut Rosensteins-Rodan, pembangunan industri secara besar-besaran akan menciptakan 3 macam eksternalitas ekonomi yaitu : (1) yang diakibatkan oleh perluasan pasar, (2) karena industri yang sama letaknya berdekatan, dan (3) karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut (Arsyad, 2004;91).

Dalam hubungannya dengan ekonomi pembangunan, istilah *external economies* menyangkut investasi di luar (eksternal) lingkungan masing-masing usaha di suatu bidang, namun hasil investasi itu membawa manfaat dalam arti menurunkan biaya bagi segenap satuan-satuan usaha di bidang yang bersangkutan. Pembuatan jaringan jalan dan telekomunikasi akan mengurangi biaya perhubungan bagi perusahaan di berbagai bidang dan ragam kegiatan usaha. Faedah ekonomisnya dikatakan bersifat eksternal karena investasi semula membawa manfaat bagi sejumlah usaha lainnya yang beraneka ragam.

c) Albert Hirschman

Hirschman berpendapat agar sebaiknya ditempuh suatu strategi pembangunan yang tidak berimbang (*strategy of unbalanced growth*). Dalam kenyataannya, di negara-negara yang sedang berkembang sudah diselenggarakan sejumlah investasi yang berasal dari masa lampau. Akan tetapi investasi tersebut terbatas pada beberapa sektor. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan di sektor lainnya (Sumitro, 1994). Investasi potensial dari sudut pendanaan justru terletak di sektor yang sudah maju yang sudah

dilakukan sejumlah investasi. Sektor maju ini sebaiknya dibina dan hasil dari investasi ini diarahkan untuk prioritas-prioritas yang terletak di sektor-sektor lainnya sehingga ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam ekonomi masyarakat dapat teratasi. Dengan kata lain yang justru diperlukan ialah strategi investasi yang tidak perlu dilaksanakan bersamaan secara berimbang di bergai bidang yang dianggap komplementer.

d) Hans W. Singer

Menurut Singer masyarakat suatu negara terbelakang dalam ekonominya 80 persen penduduknya dan angkatan kerjanya masih mengandalkan nafkahnya dari sektor primer (pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan). Transformasi masyarakat ini menuju transformasi ke ekonomi masyarakat yang lebih maju, dalam perkembangannya ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah penduduk dan angkatan kerja yang menggantungkan sektor primer berkurang dari 80 persen menjadi dibawah 15 persen (Sumitro, 1994).

Tingkat produktivitas dan pendapatan masyarakat yang rendah di sektor pertanian berarti bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat digunakan untuk kebutuhan pangan, dan jika masih tersisa akan digunakan untuk kebutuhan dasar lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa negara-negara yang sedang berkembang merupakan negara pengekspor komoditas primer dan pengimpor produksi untuk sektor skunder dan jasa untuk sektor tersier.

5) Teori Tahapan Linear WW Rostow

Teori ini pada mulanya merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* (Maret 1956) dan kemudian dikembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* (1960). Menurut pengklasifikasian Todaro (2000), teori Rostow dikelompokkan ke dalam jenjang linear.

Menurut Rostow (Sukirno, 2006; 169, Suryana, 2000; 60, Todaro, Hakim, 2002; 89), proses pembangunan ekonomi suatu negara dapat dibedakan menjadi 5 tahapan, yaitu : (1) masyarakat tradisional, (2) prasyarat tinggal landas, (3) tinggal landas, (4) menuju kedewasaan dan (5) masa konsumsi tinggi. Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah karakteristik, perubahan keadaan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang multi-dimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan meningkatnya sektor industri jasa (Arsyad, 2004, Suryana, 2000).

3. Penentu Pertumbuhan Ekonomi

a) Jumlah Penduduk

Di negara-negara yang sedang berkembang sebagian besar penduduk masih bermukim di daerah pedesaan. Untuk mata pencariannya, mereka tergantung terutama dari produksi primer yaitu sektor pertanian dan sektor ekstraktif (pertambangan dan kehutanan).

Bertambahan jumlah penduduk dan angkatan kerja menimbulkan kesulitan di sektor pertanian dan sektor-sektor yang dekat pada pertanian. Kalau nisbah antara jumlah penduduk yang terus bertambah dan luas tanah yang tersedia sudah sangat mendesak, maka pemilikan tanah menjadi semakin kecil dan terpecah-pecah. Akibatnya timbul satuan yang kurang ekonomis dalam produksi. Satu sama lain menimbulkan apa yang kita kenal sebagai fenomena pengangguran secara terselubung di daerah pedesaan. Sebagian di antara golongan tenaga kerja akan mengalir ke kawasan kota dan menimbulkan masalah urbanisasi.

Ahli-ahli ekonomi pada umumnya sependapat bahwa perkembangan penduduk dapat menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat pembangunan ekonomi. Pertambahan penduduk akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jika pertambahan penduduk dari masa ke masa dibarengi dengan peningkatan pendidikan sebelum menjadi tenaga kerja yang terampil dan terdidik, sehingga menjadikan tenaga kerja yang memiliki daya saing yang tinggi dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tapi sebaliknya perkembangan penduduk terhadap pembangunan akan tercipta apabila produktivitas sector produksi sangat rendah dan dalam masyarakat terdapat pengangguran. Pertambahan penduduk tidak akan menaikkan produksi secara signifikan, karena jumlah pengangguran meningkat terus dan menjadi bertambah serius. Disamping itu rendahnya produktivitas tenaga kerja menyebabkan perkembangan produktivitas sector pertanian menjadi rendah, hal ini menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan perkapita (Todaro, 2000).

Nelson dan Leibenstein (1974) mengemukakan teori pokok pandangan mereka pengaruh langsung penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan. Baik Nelson dan Leibenstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di Negara sedang berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang mungkin menurun. Mereka berpendapat bahwa akibat dari penambahan penduduk yang tinggi, dalam jangka panjang tingkat pendapatan perkapita kembali ke tingkat subsisten atau cukup hidup.

Menurut pendapat Nelson (1956), laju pertumbuhan penduduk tidak selalu sama pada berbagai tingkat pendapatan. Pada tingkat pendapatan perkapita yang sangat rendah tingkat kematian lebih besar dibandingkan tingkat kelahiran, maka penambahan penduduk adalah negative. Pada pendapatan perkapitan yang tinggi tingkat kematian lebih kecil dibandingkan tingkat kelahiran, maka penambahan penduduk adalah positif. Oleh karena itu makin tinggi pendapatan perkapita makin kecil tingkat kemunduran penduduk. Pada pendapatan diatas pendapatan subsisten, perkembangan penduduk akan mulai berlaku dan makin tinggi tingkat pendapatan maka laju tingkat perkembangan penduduk meningkat.

Salah satu kesimpulan yang dapat ditarik dari teori Nelson adalah bahwa suatu masyarakat dapat melepaskan dirinya dari *the low level equilibrium trap* dengan memperbesar tingkat penanaman modalnya sehingga menimbulkan pertumbuhan pendapatan nasional yang lebih besar dari pertumbuhan penduduk.

b) Kebijakan Fiskal

Negara-negara berkembang terpaksa mengandalkan pada kebijaksanaan fiskal dikarenakan belum teroganisirnya dengan baik dan terawasi untuk memobilisasi keuangan dalam negeri. Piranti pokok untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat tersebut adalah kebijaksanaan pajak, yang dipungut langsung dari perorangan, perusahaan dan harta kekayaan.

Kebijaksanaan perpajakan di negara-negara berkembang memiliki dua manfaat (Todaro, 2000) : *Pertama*, konsesi pajak dan insentif fiskal yang sejenis dianggap sebagai alat pendorong bagi perusahaan swasta. Setiap konsesi dan perangsang biasanya ditawarkan pada penanaman modal swasta asing untuk mengajak mereka agar menempatkan perusahaannya di negara-negara berkembang. Insentif pajak tersebut akan menambah masuknya perusahaan swasta asing yang menanamkan modalnya. *Kedua*, memobilisasi sumberdaya-sumberdaya untuk pengeluaran pemerintah, kemajuan ekonomi dan sosialnya sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai pengembangan program-program pelayanan umum yang sangat penting seperti sarana prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana pertanian, komunikasi dan perhubungan, serta lainnya.

(1) Belanja Bidang Pendidikan dan Pembangunan

Penyediaan fasilitas pendidikan dasar merupakan prioritas utama bagi semua negara-negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang bagian terbesar anggaran pemerintah di alokasikan ke sektor pendidikan

(Todaro, 2000). Peran pendidikan dalam pembangunan biasanya berpangkal dari pendapat bahwa pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia. Melalui pendidikan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur kehidupan ekonominya secara baik. Perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berarti membuka kesempatan ekonomis untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan kehidupan masyarakat. Selama ini pemerintahan negara-negara berkembang memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara luas namun dalam arti kuantitatif. Jalur pendidikan formal yang sudah diperluas belum juga menunjukkan hasil yang diharapkan. Jika diukur dengan serangkaian masalah yang dihadapi negara berkembang pengangguran yang terjadi cenderung meningkat dengan bertambahnya angkatan kerja yang ketrampilannya terbatas. Pertambahan penduduk mendesak ke arah menambah tempat belajar, tidak dibarengi dengan peningkatan struktur pendidikan dan kurikulum yang menghasilkan lulusan yang siap kerja, sehingga pendidikan pelatihan informal menjadi semakin penting.

(2) Belanja Bidang Kesehatan dan Pembangunan

Kesehatan dan pendidikan termasuk kategori prioritas utama dan merupakan unsur pokok dalam kualitas sumberdaya manusia. Masalah utama antara kesehatan masyarakat dan proses pembangunan adalah bahwa kesehatan menyangkut keadaan pada fisik, Mental dan sosial. Pengertian yang demikian ini dianggap terlalu luas, oleh karena itu sulit sekali diamati dan dipantau tolok ukurnya yang pasti, Dalam pandangan umum, kesehatan

diartikan sebagai keadaan di mana tidak dialami penyakit yang bersifat kronis yang cenderung meluas dan dimna cacat tubuh maupun cacat jiwa hanya diderita dalam kalangan terbatas.

Dewasa ini di banyak negara berkembang masih dirasakan kurang adanya pelayanan kesehatan masyarakat (secara kuantitatif dan kualitatif) beserta persebaran jaringannya. Pengeluaran anggaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan masyarakat masih serba terbatas dibandingkan dengan pengeluaran anggaran negara-negara maju di bidang kesehatan. Jumlah dokter dan rumah sakit yang masih sedikit, baik secara absolut maupun sebagai nisbah terhadap jumlah penduduk. Di satu sisi rumah sakit swasta hanya dapat diandalkan oleh kalangan masyarakat yang berada (Todaro, 2000).

(3) Belanja Bidang Pertanian dan Pembangunan

Dewasa ini nampak jelas bahwa para pakar ilmu ekonomi pembangunan mulai kurang berminat untuk memberikan perhatian pada upaya industrialisasi secara cepat. Nampaknya mereka menyadari bahwa daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya sama sekali tidak bersifat pasif, dan jauh lebih penting dari sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Keduanya harus ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya, yakni sebagai unsur atau elemen unggulan yang sangat penting, dinamis dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan (Todaro, 2000).

Munculnya kesadaran baru di kalangan negara-negara dunia ketiga bahwa sektor pertanian sangat menentukan masa depan mereka, maka sejak tahun 1970-an dan berlangsung hingga tahun 1990-an terjadilah suatu perubahan secara drastis dalam kegiatan pemikiran serta perumusan kebijaksanaan menyangkut soal pembangunan. Semakin lama semakin banyak negara berkembang yang tidak lagi berambisi mengejar industri dalam tempo cepat. Mereka kemudian mengambil sikap yang realistis dengan mencurahkan perhatian pada pembinaan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan yang pada umumnya menitikberatkan pada perumusan rencana serta pelaksanaan pembangunan nasionalnya.

Pembangunan bidang pertanian di negara sedang berkembang sangat tergantung pada penyediaan jaringan-jaringan pelayanan pendukung yang luas disertai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang harga atas input dan output adalah merupakan syarat penting yang harus dipenuhi demi terselenggaranya kemajuan dalam sektor pertanian dalam mendukung program pembangunan. Pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas pembangunan di Indonesia, tidak hanya karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, tetapi juga karena terpusatnya pengangguran di pedesaan harus segera dicarikan langkah penyelesaiannya guna memperbaiki kualitas hidup pedesaan. Seandainya keseimbangan kesempatan ekonomi bagi daerah pedesaan dan daerah perkotaan benar-benar tercipta, maka negara-negara berkembang akan mengalami langkah besar menuju kepada realisasi makna pembangunan yang paling hakiki.

c) **Penanaman Modal Asing**

Argumen yang mendukung penanaman modal asing sebagian besar berasal dari pendapat neoklasik tradisional mengenai penentuan pertumbuhan ekonomi. Menurut analisis ini penanaman modal asing dianggap merupakan sesuatu yang dapat mengisi celah yang ada antara tabungan yang dihimpun dari dalam negeri, cadangan devisa, penerimaan pemerintah dan keahlian di satu pihak dan jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pembangunan di pihak lain (Todaro, 2000). Bila negara yang bersangkutan dapat mengisi kekurangan tersebut dengan sumber-sumber keuangan luar negeri maka negara tersebut akan dapat mencapai sasaran pertumbuhannya dengan baik, dengan demikian penanaman modal asing memiliki peran dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Penanaman modal asing juga dapat digunakan untuk mengatasi target penerimaan pajak pemerintah dan jumlah pajak yang dapat dikumpulkan. Dengan mengenakan pajak atas keuntungan perusahaan multinasional dan ikut serta secara finansial dalam kegiatan-kegiatan mereka di dalam negeri, pemerintah negara berkembang menganggap bahwa mereka akan dapat memobilisasi sumber-sumber finansial untuk proyek-proyek pembangunan yang lebih baik.

Tetapi juga ada argumen-argumen yang menentang peran Penanaman Modal Asing dalam pembangunan, mereka berargumen walaupun perusahaan-perusahaan asing menyediakan modal, mereka dapat menurunkan tingkat tabungan dan investasi dalam negeri dengan adanya persaingan yang tidak sehat melalui perjanjian eksklusif di bidang produksi dengan pemerintah. Perusahaan asing tersebut tidak melakukan penanaman modal kembali atas keuntungan yang

mereka peroleh, hanya mempertinggi pendapatnya kelompok tertentu yang keinginan menabungnya rendah, menghalangi perluasan perusahaan dalam negeri yang mungkin menjadi barang pemasok setengah jadi. Dalam jangka panjang penanaman modal asing dapat mengurangi penghasilan/cadangan devisa baik dari sisi neraca perdagangan/transaksi berjalan maupun neraca modal. Neraca perdagangan bisa bertambah buruk karena adanya impor besar-besaran barang setengah jadi dan barang modal dan akan semakin parah karena adanya pengiriman kembali keuntungan hasil bunga, royalti, dan biaya jasa-jasa manajemen ke luar negeri (Todaro, 2003).

d) Korupsi

Pengertian korupsi Bardhan (1997: 1321) mendefinisikan korupsi sebagai “*the use of public office for private gains, where an official (the agent) entrusted with carrying out a task by the public (the principal) engages in some sort of malfeasance for private enrichment which is difficult to monitor for the principal*”. Jadi substansi dari korupsi yaitu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang mengakibatkan pada kerugian negara.

Jika dilihat dari sisi ekonomi makro korupsi ini umumnya lebih banyak berdampak negatif pada perekonomian nasional, korupsi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, dalam pandangan ekonomi mikro, dalam arti dilihat dari sudut pandang pelaku-pelaku ekonomi yang membayarkan sogokan pada para pejabat yang korup tersebut, perbuatan korupsi itu justru dapat mempertinggi tingkat efisiensi dan mendukung usahanya. Ini berkaitan dengan

berbagai keistimewaan yang diperoleh sebagai implikasi dari dana yang dikeluarkannya. Namun pendapat sementara ekonom masih terdapat perdebatan tentang efek korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi ini.

Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi dapat saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini melalui dua tipe mekanisme (Mauro, 1995). Pertama, praktek korupsi melalui pemberian dana untuk mempercepat sesuatu urusan (*speed money*) memungkinkan pelaku ekonomi terhindar dari penundaan-penundaan urusannya. Terhindar penundaan bagi aktivitas ekonomi berarti biaya, baik itu dari sisi peluang usaha yang mungkin lepas, ataupun biaya-biaya dari bunga, dan ongkos lainnya. Ini dapat mendukung pertumbuhan apabila negara tersebut aturan birokrasinya sangat buruk. Kedua, adanya korupsi ini dapat mendorong pegawai pemerintah untuk bekerja lebih keras. Mereka yang sebelumnya tidak terlalu bersemangat menyelesaikan urusan rutusnya menjadi terstimulasi untuk bekerja karena adanya insentif dari uang pelayanannya. Hal yang seperti ini dapat terjadi di negara manapun.

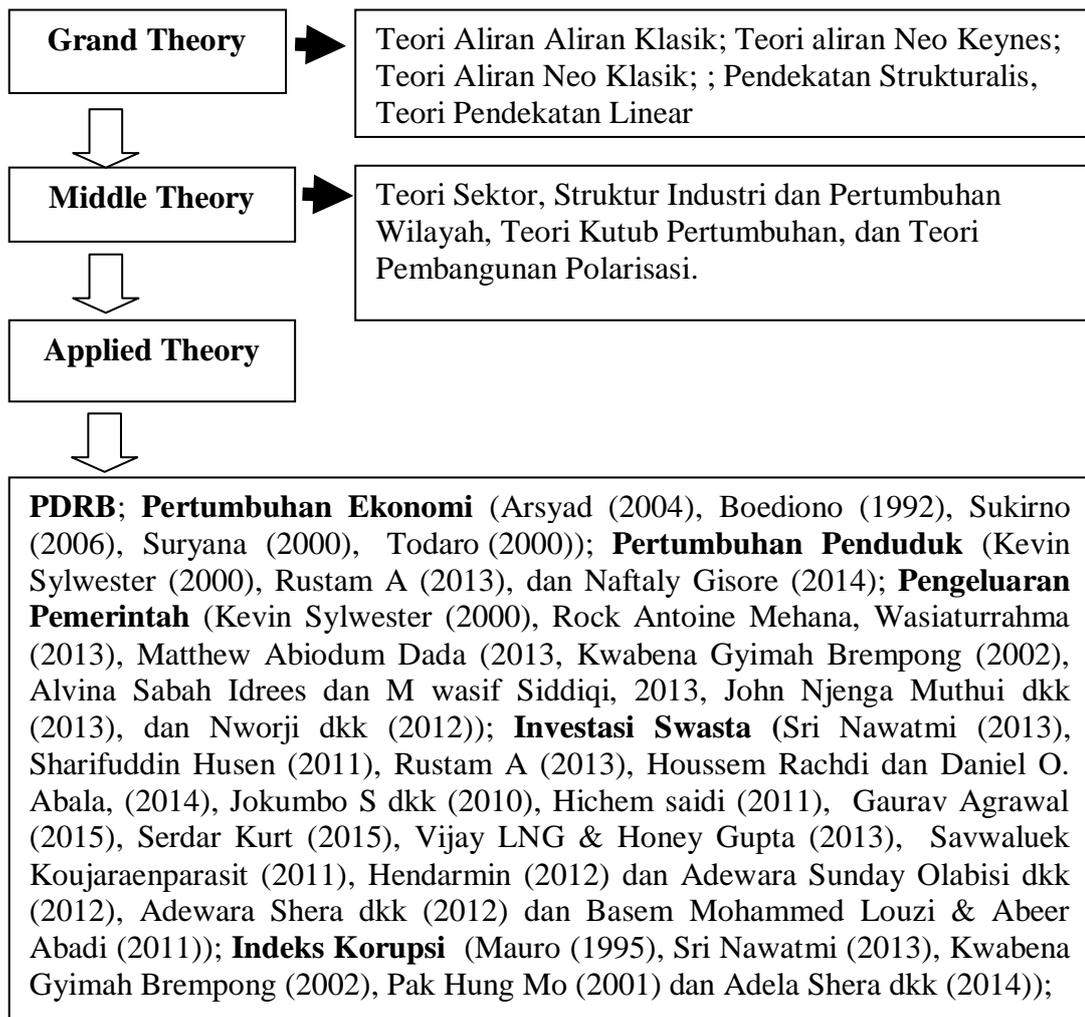
Namun demikian, dari banyak pendapat dan studi yang ada berpandangan bahwa korupsi ini justru memperlambat atau menurunkan pertumbuhan ekonomi, di samping juga menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pendapatan masyarakat. Temuan-temuan dari Murphy, Shleifer, dan Vishny (1993) menunjukkan bahwa negara-negara yang banyak aktivitas korupsi atau "*rent seeking activities*"-nya cenderung lambat pertumbuhan ekonominya. Pandangan ini lebih mudah dipahami, karena adanya korupsi berarti ada biaya lain-lain, atau akan mempersulit suatu aktivitas ekonomi, yang akibatnya bisa

meninggikan biaya atau memperkecil minat untuk melakukan investasi sehingga mengganggu kelancaran pertumbuhan ekonomi.

Akibat lain dari korupsi ini adalah terjadi ketimpangan pembangunan di antara pelaku-pelaku ekonomi, sebagai akibat ketidakadilan dalam perolehan fasilitas yang diberikan oleh birokrasi melalui praktek korupsi dan kolusi, ataupun nepotisme. Karenanya, sepanjang praktek-praktek ini masih terjadi, maka upaya mengoptimalkan efisiensi di bidang ekonomi tidak pernah akan terwujud, yang berarti perekonomian selalu dalam kondisi tidak efisien dan memiliki daya saing yang rendah. Oleh karena itu, penghapusan praktik-praktek korupsi dan kolusi, ataupun nepotisme ini merupakan bagian reformasi ekonomi yang arahnya untuk meningkatkan produktivitas yang akan mendorong pembangunan nasional.

B. Grand Theory, Middle Theory dan Applied Theory

Grand theory merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai tingkatan/level. Disebut sebagai *grand theory* karena teori-teori ini berada pada level makro. *Middle theory* merupakan teori yang berada pada level menengah dimana fokus kajiannya makro dan mikro. *Applied theory* merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi. Penulis menguraikan *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory* untuk diterapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Sumber : Agnes, 2013

C. Penelitian Sebelumnya

1. Pengaruh Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertambahan penduduk yang sedemikian cepat menimbulkan aneka permasalahan yang serius bagi kesejahteraan umat manusia di penjuru dunia. Sejauh manakah masalah penduduk di banyak negara akan dapat menunjang atau menghambat pembangunan ekonomi.

Hubungan Antara jumlah penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti seperti dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No	Peneliti	Keterangan
4	Kevin Sylwester (2000)	Sign (+)
11	Rustam A (2013)	Sign (+)
19	Adela Shera dkk (2014)	Sign (-)
21	Naftaly Gisore (2014)	Sign (+)

Sumber : Lampiran

Penelitian yang dilakukan Kevin Sylwester (2000), Rustam A (2013), dan Naftaly Gisore (2014) menyatakan bahwa penambahan penduduk yang dibarengi dengan usaha-usaha peningkatan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan umum akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi jika penambahan penduduk tidak diimbangi dengan usaha-usaha seperti diatas akan menghambat pembangunan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Adela Shera dkk (2014) dengan dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di 22 negara berkembang periode 2001-2012 dengan menggunakan data panel menghasilkan kesimpulan perkembangan penduduk menghambat pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan penambahan penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas penduduk melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan.

2. Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara (melalui pengeluaran untuk pendidikan, pengeluaran untuk kesehatan, pengeluaran untuk pertanian, dan sebagainya) untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Kebijakan fiskal bersumber pada penerimaan negara dari pajak maupun bukan pajak dan

dialokasikan dalam bentuk pengeluaran negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanjanya.

Hubungan Antara pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi telah banyak dilakukan oleh peneliti seperti pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Hasil Penelitian Pengaruh Kebijakan Fiskal (Alokasi Anggaran Pendidikan) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No	Peneliti	Keterangan
4	Kevin Sylwester (2000)	Sign(+)
6	Rock Antoine Mehana	Sign(+)
12	Wasiaturrahma (2013)	Sign(+)
14	Matthew Abiodun Dada (2013)	Sign(+)
17	Kwabena Gyimah Brempong (2002)	Sign(+)
20	Alvina Sabah Idrees dan M wasif Siddiqi, 2013	Sign(+)
33	John Njenga Muthui dkk (2013)	Sign(+)
35	Nworji dkk (2012)	Sign(+)
19	Adela Shera dkk (2014)	Sign(-)
5	David E Bloom dkk (2010)	Tidak sign
16	Adewara Sunday Olabisi dkk (2012)	pendidikan tidak Sign
21	Naftaly Gisore (2014)	Pendidikan tidak sign.
34	Ali sulieman Al-Shafti	Pendidikan tidak sign

Sumber : Lampiran

Kevin Sylwester (2000), Rock Antoine Mehana, Wasiaturrahma (2013), Matthew Abiodun Dada (2013), Kwabena Gyimah Brempong (2002), Alvina Sabah Idrees dan M wasif Siddiqi, 2013, John Njenga Muthui dkk (2013), dan Nworji dkk (2012) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Adela Shera dkk (2014) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap pembangunan ekonomi.

Sedangkan Adewara Sunday Olabisi dkk (2012), Naftaly Gisore (2014) dan Ali sulieman Al-Shafti dalam penelitian yang mereka lakukan menyimpulkan bahwa

pengeluaran pemerintah untuk alokasi pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Antara pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi telah banyak dilakukan oleh peneliti seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Hasil penelitian pengaruh anggaran kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi

No	Peneliti	Keterangan
14	Matthew Abiodun Dada (2013)	Sign (+)
16	Adewara Sunday Olabisi dkk (2012)	Sign (+)
21	Naftaly Gisore (2014)	Sign (+)
27	Serdar Kurt (2015)	Sign (+)
33	John Njenga Muthui dkk (2013)	Sign (+)
34	Ali sulieman Al-Shafti	Sign (+)
35	Nworji dkk (2012)	Sign (+)

Sumber : Lampiran

Seluruh penelitian tentang pengaruh anggaran kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi menyimpulkan bahwa anggaran kesehatan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan anggaran kesehatan berdampak kepada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat mengakibatkan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dianggap sebagai unsur penunjang, pembangunan diartikan dengan transformasi struktural dari perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi perekonomian industri barang dan jasa. Sehingga peranan pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam mendorong aktivitas di bidang pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian (seperti irigasi, pupuk dan bibit). Dari tabel 2.4 dapat kita lihat Oyakhilomen Oyinbo dkk. 2013 dalam penelitiannya menyatakan bahwa anggaran bidang pertanian

tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Ebere, Chidinma, dan Osundina, Kemisola C, 2012 menyatakan dalam penelitiannya bahwa anggaran pemerintah untuk alokasi pertanian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.4 Hubungan Antara pengeluaran Pemerintah Untuk Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No	Peneliti	Keterangan
1	Oyakhilomen Oyibo dkk. 2013,	Tidak Sign
2	Ebere, Chidinma, dan Osundina, Kemisola C, 2012	Sign (+)

Sumber : Lampiran

Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian suatu wilayah (misal: sarana prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lainnya) akan mengakibatkan peningkatan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari tabel 2.5 dapat kita lihat hampir sebagian penelitian mendukung bahwa pengeluaran pemerintah yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.5. Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No	Peneliti	Keterangan
3	Suleiman A.S. Aruwa (2012)	Sign (+)
10	Ndari Sujaningsih dkk (2012)	Sign (+)
11	Rustam A (2013)	Sign (+)
12	Wasiaturrahma (2013)	Sign (+)
15	Chiawa M.M. dkk (2012)	Sign (+)
22	Oni dkk (2014)	Sign (+)
28	Vijay LNG & Honey Gupta (2013)	Sign (+)
38	Ebaidalla Mahjoub Ebaidalla (2013)	Sign (+)
40	John Loizides (2005)	Sign (+)
42	Zuzana sakarupova, 2014	Sign (+)
43	Rikwan ES manik & Paidi Hidayat, 2010	Sign (+)
13	P Srinivasan (2013)	Sign (-)
7	Hendarmin (2012)	Tidak sign
39	Ergun Dagur dkk (2006)	Tidak sign

Sumber : Lampiran

Tetapi juga ada beberapa peneliti seperti Hendarmin (2012) dan Ergun Dagur dkk (2006) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa anggaran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan P Srinivasan (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa anggaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat terjadi karena pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran.

3. Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori pembangunan ekonomi ada argumentasi pendukung dan yang kontra terhadap peranan perusahaan asing dalam mendukung pembangunan ekonomi. Demikian pula dalam penelitian seperti yang terlihat dalam tabel 2.5 dibawah ini. Hampir sebagian besar peneliti setuju bahwa penanaman modal asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peranannya di dalam mengisi kekurangan sumberdaya antara investasi yang ditargetkan dengan tabungan dalam negeri yang dapat di mobilisasi.

Tabel 2.5 Hubungan Antara Investasi Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No	Peneliti	Keterangan
6	Rock Antoine Mehana	Sign(+)
8	Sri Nawatmi (2013)	Sign(+)
9	Sharifuddin Husen (2011)	Sign(+)
11	Rustam A (2013)	Sign(+)
23	Housseem Rachdi dan Hichem saidi (2011)	Sign(+)
24	Jokumbo S dkk (2010),	Sign(+)
25	Daniel O. Abala, (2014),	Sign(+)
26	Gaurav Agrawal (2015),	Sign(+)
27	Serdar Kurt (2015)	Sign(+)
28	Vijay LNG & Honey Gupta (2013)	Sign(+)
30	Savwaluek Koujaraenparasit (2011)	Sign(+)
31	Leonid Melnyk dkk (2014)	Sign(+)
32	Nuno Carlos Leitao & Saeed RASEKHI (2013)	Sign(+)
41	Z A Sultan & Md Imdadul Haque, 2011	Sign(+)

No	Peneliti	Keterangan
42	Zuzana sakarupova, 2014	Sign(+)
7	Hendarmin (2012)	Sign(-)
19	Adela Shera dkk (2014)	Sign(-)
16	Adewara Sunday Olabisi dkk (2012)	Tidak sign
29	Basem Mohammed L & Abeer Abadi (2011)	Tidak Sign

Sumber : Lampiran

Sedangkan peneliti yang lain Hendarmin (2012) dan Adewara Sunday Olabisi dkk (2012) berpendapat Penanaman modal asing justru menurunkan pertumbuhan ekonomi melalui perjanjian eksklusif di bidang produksi dengan pemerintah dengan tidak melakukan kembali keuntungan yang mereka dapatkan.

Adewara Shera dkk (2012) dan Basem Mohammed Louzi & Abeer Abadi (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penanaman modal asing tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa penulis berpendapat bahwa korupsi dapat saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini melalui dua tipe mekanisme (Mauro, 1995). *Pertama*, praktek korupsi yang dengan pemberian dana untuk mempercepat sesuatu urusan (*speed money*) sehingga memungkinkan pelaku ekonomi terhindar dari penundaan-penundaan urusannya. Sebagaimana diketahui, terhindar penundaan bagi aktivitas ekonomi berarti biaya, baik itu dari sisi peluang usaha yang mungkin lepas, ataupun biaya-biaya dari bunga, dan ongkos lainnya. Ini dapat mendukung pertumbuhan apabila negara tersebut aturan birokrasinya sangat buruk. *Kedua*, adanya korupsi ini dapat mendorong pegawai pemerintah untuk bekerja lebih keras. Mereka yang sebelumnya tidak terlalu bersemangat menyelesaikan urusan rutinnnya menjadi terstimulasi untuk

bekerja karena adanya insentif dari uang pelayanannya. Hal yang seperti ini dapat terjadi di negara manapun.

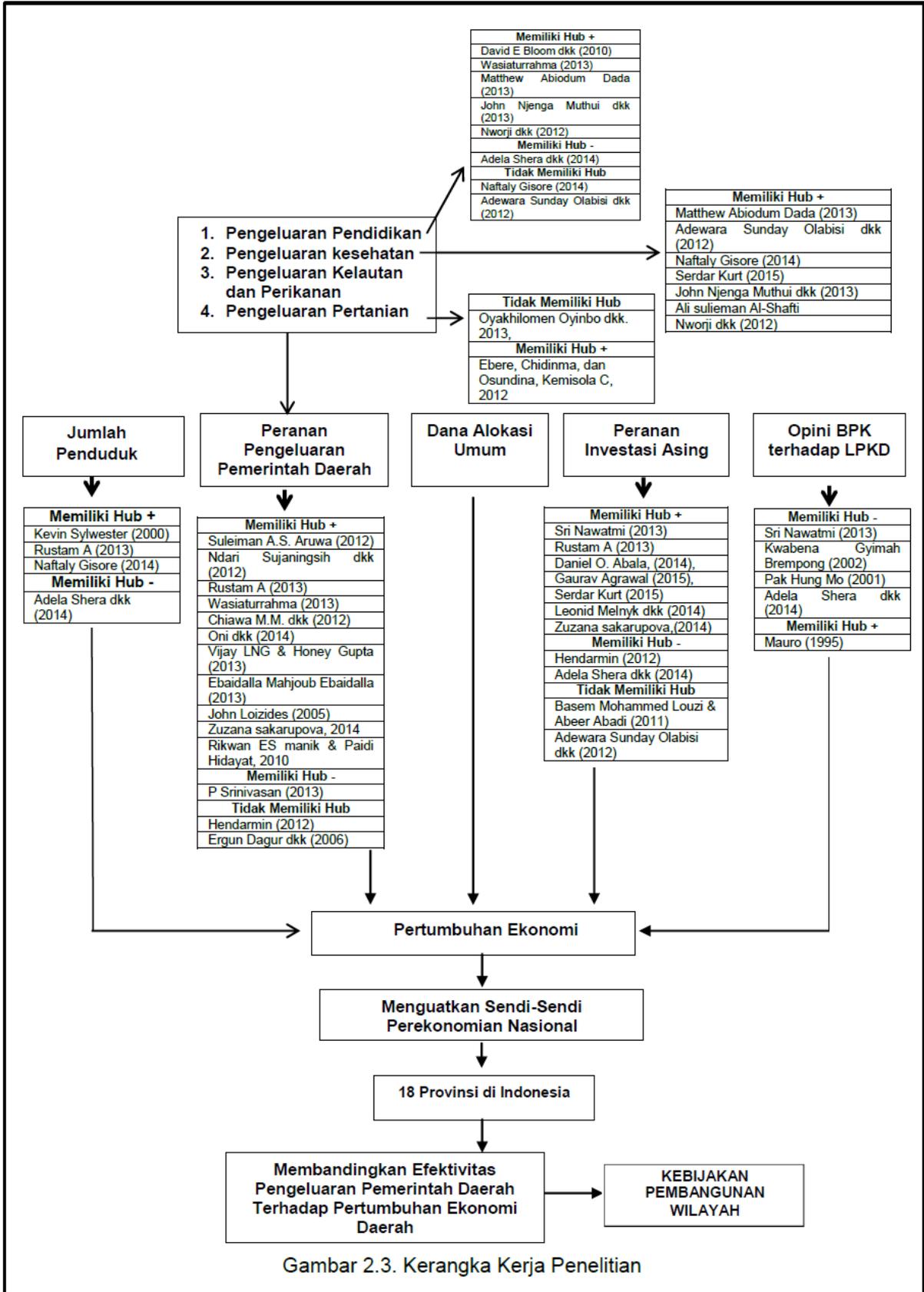
Tabel 2.6 Hubungan Antara Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No	Peneliti	Keterangan
36	Mauro (1995)	Sign (+)
8	Sri Nawatmi (2013)	Sign (-)
17	Kwabena Gyimah Brempong (2002)	Sign (-)
18	Pak Hung Mo (2001)	Sign (-)
19	Adela Shera dkk (2014)	Sign (-)

Sumber : Lampiran

Sedangkan Sri Nawatmi (2013), Kwabena Gyimah Brempong (2002), Pak Hung Mo (2001) dan Adela Shera dkk (2014) lebih cenderung berpandangan bahwa korupsi ini justru memperlambat atau menurunkan pertumbuhan ekonomi, di samping juga menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Adapun kerangka kerja dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 2.3 di bawah ini :



D. Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Jumlah Penduduk diduga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan diduga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan diduga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kelautan dan Perikanan diduga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pertanian diduga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Dana Alokasi Umum diduga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Investasi Asing diduga memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
8. Opini BPK terhadap LPKD diduga memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektifitas pengeluaran pemerintah daerah terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat menciptakan strategi pembangunan yang efektif dan sesuai dengan sasaran pembangunan yang diinginkan.

Pada penelitian ini dilakukan pengujian peranan pengeluaran pemerintah daerah untuk anggaran pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian serta dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta peranan investasi dan opini BPK terhadap LKPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran melalui pengurangan jumlah orang miskin dan pengangguran. Kemudian dianalisis efektifitas peranan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia melalui efektifitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi..

A. Jenis Data dan Sumber Data

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Variabel Terikat	Pertumbuhan Ekonomi
Variabel Bebas	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Penduduk2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan3. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan4. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kelautan dan Perikanan5. Pengeluaran Pemerintah untuk Pertanian6. Dana Alokasi Umum7. Investasi Asing8. Opini BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Cara pengambilan data adalah dengan cara mengumpulkan data skunder di BPS, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan berbagai terbitan dari tahun 2010 sampai 2014. **Data skunder** adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga dan dari sumber yang sudah ada.

B. Definisi Operasional

- Variabel Terikat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
- PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk domestik regional bruto (PDRB) diukur dalam satuan rupiah dan diperoleh dari PDRB berdasarkan harga konstan (2010=1000).
- Variabel Bebas
1. Jumlah Penduduk adalah masyarakat yang tinggal menetap di wilayah yang bersangkutan dan tertera dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan wilayah tersebut. Jumlah penduduk dinyatakan dalam orang.
 2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Alokasi Pendidikan diperoleh APBD Provinsi berdasarkan Fungsi dan hanya diambil Pengeluaran Pemerintah untuk alokasi sektor pendidikan.
 3. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan diperoleh dari APBD Provinsi berdasarkan Fungsi dan hanya diambil Pengeluaran Pemerintah untuk alokasi sektor kesehatan.
 4. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kelautan dan Perikanan diperoleh dari Provinsi berdasarkan Fungsi dan hanya diambil Pengeluaran Pemerintah untuk alokasi sektor kelautan dan perikanan.
 5. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pertanian diperoleh dari Provinsi berdasarkan Fungsi dan hanya diambil Pengeluaran Pemerintah untuk alokasi sector pertanian.
 6. Dana Alokasi Umum dan besarnya Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden.
 7. Investasi Asing diperoleh dari perbandingan Investasi daerah dibagi PDRB
 8. Opini BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Variabel ini dinyatakan dalam bentuk Dummy

C. Metode Analisis Data

Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*).

Dalam ilmu ekonomi, analisis data panel digunakan untuk mempelajari perilaku perusahaan dan upah dari waktu ke waktu. Dalam ilmu politik, digunakan untuk mempelajari perilaku politik dari partai-partai dan organisasi dari waktu ke waktu. Hal ini digunakan dalam psikologi, sosiologi, dan penelitian kesehatan untuk mempelajari karakteristik kelompok orang diikuti dari waktu ke waktu. Dalam penelitian pendidikan, peneliti mempelajari kelas siswa atau lulusan dari waktu ke waktu. Dengan pengamatan berulang cukup penampang, analisis panel memungkinkan peneliti untuk mempelajari dinamika perubahan dengan *time series* singkat. Kombinasi *time series* dengan penampang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan cara yang tidak mungkin hanya menggunakan salah satu dari dua dimensi (Gujarati, 2003; 638-640). Analisis data panel dapat memberikan sebuah studi yang kaya dan kuat dari satu set orang, jika ada yang bersedia untuk mempertimbangkan baik ruang dan dimensi waktu dari data.

Menurut Agus Widarjono (2009) penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. **Pertama**, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. **Kedua**, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*).

Hsiao (2006), mencatat bahwa penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis *cross section* maupun *time series*. Pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja.

Dan Ketiga, panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Penggunaan data panel dalam permodelan memiliki kelebihan dan kelemahan. Hsiao (2006) dan Klevmarken (1989) dalam Baltagi (2005) memaparkan manfaat penggunaan data panel, antara lain: (1). Mengontrol heterogenitas individu. Data panel dapat memperlakukan individu, perusahaan, negara secara heterogen. Ditambahkan pula oleh Greene (2002) yang menyebutkan bahwa pada beberapa data panel, jumlah unit cross section besar, tetapi periode observasi kecil, sehingga metode deret waktu tidak cocok lagi digunakan. Kondisi data yang seperti ini akan lebih baik jika dianalisis dengan teknik yang difokuskan pada variasi cross section atau heterogenitas. Selain itu, data panel juga mampu menganalisis variabel yang tidak berubah sepanjang waktu (*time invariant/time constant variable*). (2). Data panel lebih informatif, bervariasi, kolinearitas antar variabel lebih kecil, derajat bebas lebih besar, serta lebih efisien. Data yang lebih informatif dapat menghasilkan estimasi parameter yang lebih terpercaya. (3). Data panel baik untuk menganalisis fenomena dinamis, salah satunya kemiskinan dan dinamika pendapatan. (4). Data panel baik untuk mengidentifikasi dan mengukur efek-efek yang tidak dapat dideteksi pada data cross section maupun deret waktu.

1. Model Regresi Data Panel

Model Regresi Panel dari judul diatas sebagai berikut ini:

$$Y_{ti} = \beta_0 + \beta_1 X_{1ti} + \beta_2 X_{2ti} + \beta_3 X_{3ti} + \beta_4 X_{4ti} + \beta_5 X_{5ti} + \beta_6 X_{6ti} + \beta_7 X_{7ti} + \beta_7 X_{7ti} + \epsilon_t$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi)

α = Konstanta

X1 = Variabel Jumlah Penduduk

X2 = Variabel Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan

X3 = Variabel Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan

X4 = Variabel Pengeluaran Pemerintah Untuk Kelautan

X5 = Variabel Pengeluaran Pemerintah Untuk Pertanian

X6 = Variabel Dana alokasi Umum

X7 = Variabel Penanaman Modal asing

- X8 = Variabel Opini BPK terhadap LPKD
 $\beta_{(1...2)}$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
 ε = *Error term*
t = Waktu
i = Wilayah

2. Metode Estimasi Model Regresi Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

a. *Common Effects Model*

Model *common effects* merupakan pendekatan data panel yang paling sederhana. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool*, mengestimasiya menggunakan pendekatan kuadrat terkecil/*pooled least square* (Gujarati, 2003 ; 637).

Adapun persamaan regresi dalam model *common effects* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

i = Aceh, Sumut,....., Papua

t = 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

dimana *i* menunjukkan *cross section* (individu) dan *t* menunjukkan periode waktunya. Dengan asumsi komponen *error* dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa, proses estimasi secara terpisah untuk setiap unit *cross section* dapat dilakukan.

b. *Fixed Effects Model*

Model *Fixed effects* mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan itu dapat diakomodasi melalui perbedaan pada

intersepnya. Oleh karena itu, dalam model *fixed effects*, setiap merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel *dummy* yang dapat ditulis sebagai berikut (Gujarati, 2003) :

$$Y_{it} = \alpha + i\alpha_{it} + X'_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_1 \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_{11} & x_{21} & x_{p1} \\ x_{12} & x_{22} & x_{p2} \\ x_{1n} & x_{2n} & x_{pn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

Teknik seperti diatas dinamakan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat mengakomodasi efek waktu yang bersifat sistemik. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan variabel *dummy* waktu di dalam model.

c. *Random Effects Model*

Berbeda dengan *fixed effects model*, efek spesifik dari masing-masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen *error* yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati, model seperti ini dinamakan *random effects model* (REM). Model ini sering disebut juga dengan *error component model* (ECM). Dengan demikian, persamaan model *random effects* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + w_{it}$$

i = Aceh, Sumut,....., Papua

t = 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Dimana :

$$\begin{aligned} w_{it} &= \varepsilon_{it} + u_i ; E(w_{it}) = 0; E(w_{it}^2) = \alpha^2 + \alpha_u^2; \\ E(w_{it}, w_{jt-1}) &= 0; i \neq j; E(u_i, \varepsilon_{it}) = 0; \\ E(\varepsilon_i, \varepsilon_{is}) &= E(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{jt}) = E(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{js}) = 0 \end{aligned}$$

Meskipun komponen error w_t bersifat homoskedastik, nyatanya terdapat korelasi antara w_t dan w_{t-1} (equicorrelation), yakni :

$$\text{Corr}(w_{it}, w_{i(t-1)}) = \alpha_u^2 / (\alpha^2 + \alpha_u^2)$$

Karena itu, metode OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien bagi model *random effects*. Metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effects* adalah *Generalized Least Squares (GLS)* dengan asumsi homokedastik dan tidak ada *cross-sectional correlation* (Gujarati, 2003).

3. Pemilihan Model

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni:

a. Uji Chow (Radundant Test)

Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan model *Fixed Effet* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0 : Common Effect Model atau pooled OLS

H1 : Fixed Effect

b. Uji Hausman

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H0 : Random Effect Model

H1 : Fixed Effect Model

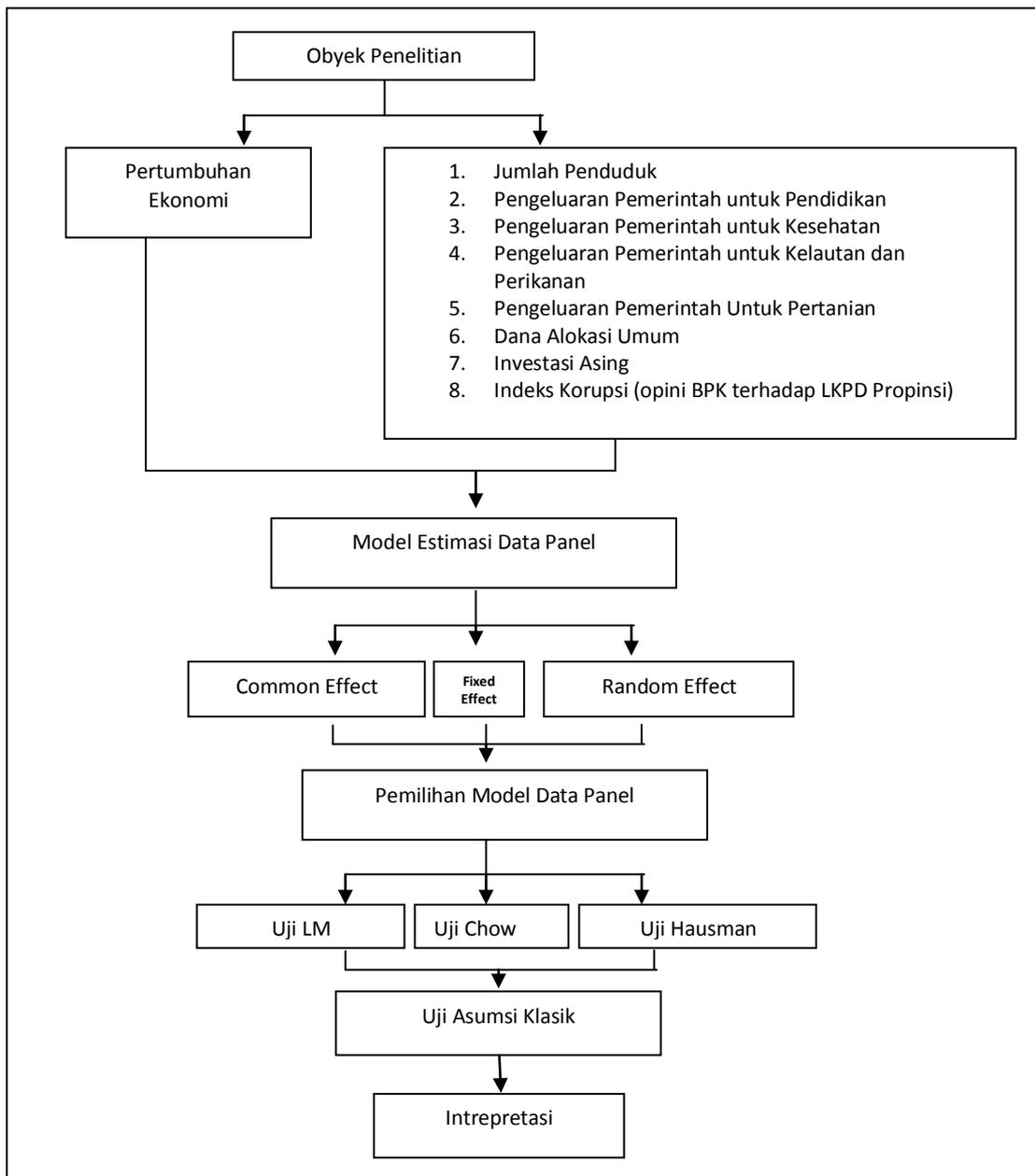
c. Uji Lagrange Multiplier

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik daripada metode *Common Effect* (OLS) digunakan uji Lagrange Multiplier (LM).

Perbedaan mendasar untuk menentukan pilihan antara FEM (*Fixed Effects Model*) dan ECM (*Error Component Model*) antara lain sebagai berikut (Gujarati, 2003) :

- a. Jika T (jumlah data *time series*) besar dan N (jumlah unit *cross-section*) kecil, perbedaan antara FEM dan ECM adalah sangat tipis. Oleh karena itu, dapat dilakukan penghitungan secara konvensional. Pada keadaan ini, FEM mungkin lebih disukai.
- b. Ketika N besar dan T kecil, estimasi diperoleh dengan dua metode dapat berbeda secara signifikan. Pada ECM, dimana adalah komponen random *cross-section* dan pada FEM, ditetapkan dan tidak acak. Jika sangat yakin dan percaya bahwa individu, ataupun unit *cross-section* sampel adalah tidak acak, maka FEM lebih cocok digunakan. Jika unit *cross-section* sampel adalah random/acak, maka ECM lebih cocok digunakan.
- c. Komponen *error* individu dan satu atau lebih regresor berkorelasi, estimator yang berasal dari ECM adalah bias, sedangkan yang berasal dari FEM adalah *unbiased*.
- d. Jika N besar dan T kecil, serta jika asumsi untuk ECM terpenuhi, maka estimator ECM lebih efisien dibanding estimator FEM.

Gambar 3.1 Tahapan Analisis Data panel



Sumber : Gujarati, 2003

4. Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS.

1. Uji linieritas tidak dilakukan pada setiap model regresi linier. Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Kalaupun harus dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya.
2. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.
3. Autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.
4. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas.
5. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke data *cross section* dibandingkan *time series*.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang gambaran umum data yang akan digunakan dalam regresi, yaitu perkembangan PDRB, perkembangan penduduk, pengeluaran pemerintah untuk alokasi pendidikan, alokasi kesehatan, alokasi kelautan dan alokasi perikanan, alokasi pertanian, dana alokasi umum, dan investasi langsung dalam bentuk PMA dan opini penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

A. Deskripsi Data

1. Perkembangan PDRB di 18 provinsi

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDRB atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase (pertumbuhan ekonomi).

**Tabel 4.1. Perkembangan PDRB di Beberapa Propinsi
Tahun 2010 sd 2014 (Juta Rupiah)**

No	Propinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata Pertb
Sumatra							
1	NAD	33.103.000	34.705.000	36.488.000	38.013.000	39.705.500	4,65
2	SUMUT	118.719.000	126.568.000	134.462.000	142.537.000	150.408.500	6,09
3	RIAU	97.736.000	102.666.000	106.299.000	109.073.000	113.354.500	3,78
4	SUMSEL	63.859.000	68.008.000	72.096.000	76.410.000	80.528.500	5,97
5	BENKULU	8.340.000	8.879.000	9.465.000	10.052.000	10.614.500	6,22
Jawa							
6	JAWA TENGAH	186.993.000	198.270.000	210.848.000	223.100.000	235.027.500	5,88
7	BANTEN	88.552.000	94.198.000	99.992.000	105.856.000	111.576.000	5,95
Nusa Tenggara							
8	NTB	20.073.000	19.533.000	19.319.000	20.417.000	21.515.000	1,82
9	NTT	12.547.000	13.252.000	13.970.000	14.746.000	15.457.500	5,35
Kalimantan							
10	KALSEL	30.675.000	32.553.000	34.413.000	36.196.000	38.065.000	5,55
11	KALTIM	110.953.000	115.490.000	120.086.000	121.990.000	126.556.500	3,35

No	Propinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata Pertb
Sulawesi							
12	SULUT	18.377.000	19.735.000	21.287.000	22.872.000	24.327.000	7,27
13	SULTENG	17.624.000	19.231.000	21.008.000	22.979.000	24.671.000	8,78
14	SULBAR	4.744.000	5.233.000	5.704.000	6.113.000	6.593.000	8,58
Maluku							
15	MALUKU	4.251.000	4.509.000	4.861.000	5.111.000	5.416.000	6,25
16	MALUT	3.036.000	3.230.000	3.446.000	3.656.000	3.861.000	6,19
Papua							
17	PAPUA	22.400.000	21.208.000	21.436.000	24.617.000	25.829.333	3,88
18	PAPUA BARAT	10.405.333	11.890.000	13.780.000	15.062.000	16.749.333	12,67
Rerata Pertumbuhan Propinsi							6,0127

Sumber : BPS (Berbagai Terbitan)

Jika kita perhatikan data dalam tabel 4.1. dapat kita lihat propinsi Jawa Tengah menduduki ranking tertinggi dalam memperoleh PDRB (Rp. 235.027.500 juta), diikuti oleh Sumatera Utara (150.408.500) dan Kalimantan Timur (126.556.500). Sedangkan PDRB terendah diduduki oleh provinsi Maluku Utara(3.861.000), Maluku (5.416.000) dan Sulawesi Barat (6.593.000). Untuk perkembangan pertumbuhan PDRB, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh propinsi Papua Barat (12,67 %), Sulawesi Tenggara (8,78%) dan Sulawesi Barat (8,58%). Sedang terendah dicapai oleh Nusa Tenggara Barat (1,82%), Kalimantan Timur (3,35%) dan Riau (3,78%)

2. Perkembangan Investasi di 18 provinsi

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contohnya membangun rel kereta api atau pabrik. Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus $PDB = C + I + G + (X-M)$. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan

mesin) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya $I = (Y, i)$. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

Berdasarkan Tabel 4.2. dapat kita perhatikan Daerah tujuan investasi terutama investasi asing adalah Kalimantan Timur, Sulteng dan Banten, sedangkan daerah yang kurang diminati Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat. Padahal investasi adalah sebagai lokomotif dalam menggerakkan perekonomian daerah, maka bagi daerah yang tidak diminati perlu dicarikan solusi, diantaranya :

- a. Daerah harus mengidentifikasi potensi ekonomi yang dimilikinya dan yang memiliki nilai ekonomis.
- b. Daerah harus membuat iklim investasi yang menarik, yaitu dengan membuat peraturan yang pro investor dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang tidak melanggar aturan.
- c. Mengemas dalam bentuk pemasaran daerah yang inovatif.

Tabel 4.2. Perkembangan Realisasi Investasi PMA Menurut Lokasi Tahun 2010 sd 2014

NO.	LOKASI	2010		2011		2012		2013		2014	
		P	I	P	I	P	I	P	I	P	I
I	SUMATERA										
1	N ACEH D	13	4,6	40	22,5	26	172,3	87	94,2	49	31,1
2	SUMATERA UTARA	78	181,1	115	753,7	133	645,3	347	887,5	249	550,8
3	R I A U	45	86,6	64	212,3	81	1.152,9	168	1.304,9	129	1.369,6
4	SUMATERA SELATAN	51	186,3	99	557,3	107	786,4	142	485,9	114	1.056,5
5	BENGKULU	11	25,1	18	43,1	21	30,4	27	22,3	17	19,3
II	JAWA										
6	D.I YOGYAKARTA	20	4,9	22	2,4	28	84,9	62	29,6	48	64,9
7	BANTEN	280	1.544,2	361	2.171,7	405	2.716,3	592	3.720,2	709	2.034,6
III	NUSA TENGGARA										
8	NUSA TENGGARA BARAT	81	220,5	113	465,1	133	635,8	252	488,2	167	551,1
9	NUSA TENGGARA TIMUR	12	3,8	24	5,5	20	8,7	59	9,9	57	15,1
IV	KALIMANTAN										
10	KALIMANTAN SELATAN	44	202,2	47	272,1	54	272,3	120	260,6	78	502,5
11	KALIMANTAN TIMUR	98	1.092,2	146	602,4	167	2.014,1	332	1.335,4	191	2.145,7
V	SULAWESI										
12	SULAWESI UTARA	25	226,8	40	220,2	70	46,7	103	65,7	69	98,5
13	SULAWESI TENGAH	7	138,5	18	370,4	27	806,5	44	855,0	58	1.494,2
14	SULAWESI BARAT	4	37,3	5	5,6	3	0,2	6	2,5	7	16,2
VI	MALUKU										
15	MALUKU	5	2,9	15	11,7	10	8,5	58	52,8	33	13,1
16	MALUKU UTARA	5	246,0	16	129,8	9	90,3	36	268,5	23	98,7
VII	PAPUA										
17	PAPUA	18	329,6	36	1.312,0	21	1.202,4	87	2.360,0	42	1.260,6
18	PAPUA BARAT	10	17,2	25	33,1	18	32,0	67	54,2	42	153,3

Sumber : BKPM (Berbagai Terbitan)

3. Alokasi Anggaran Pendidikan

Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Tabel 4.3. Perkembangan Anggaran Pendidikan di Beberapa Propinsi Tahun 2010 sd 2014 (Juta Rupiah)

No	Propinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata	
							Anggaran	%
Sumatra								
1	NAD	934.427	898.432	906.936	638.365	1.272.862	930.204	16,72
2	SUMUT	238.109	100.426	362.873	239.707	206.114	229.446	38,89
3	RIAU	483.606	346.600	461.690	466.407	531.060	457.873	4,94
4	SUMSEL	562.557	210.865	244.650	273.713	261.199	310.597	-9,80
5	BENGKULU	66.956	61.106	116.211	130.423	138.889	102.717	25,04
Jawa								
6	JATENG	283.958	264.582	257.218	271.397	271.213	269.674	-1,04
7	BANTEN	165.482	190.857	222.814	278.448	308.400	233.200	16,95
Nusa Tenggara								
8	NTB	22.610	16.679	30.065	30.153	38.994	27.700	20,91
9	NTT	74.659	74.474	81.341	72.066	49.539	70.416	-8,42
Kalimantan								
10	KALSEL	302.257	353.395	171.115	361.429	422.201	322.080	23,34
11	KALTIM	325.103	272.555	308.031	588.007	663.840	431.507	25,16

No	Propinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata	
							Anggaran	%
Sulawesi								
12	SULUT	63.983	85.940	88.551	85.124	78.026	80.325	6,29
13	SULTENG	65.149	70.244	79.083	103.487	110.089	85.610	14,41
14	SULBAR	29.627	27.431	42.505	35.300	45.402	36.053	14,80
Maluku								
15	MALUKU	132.458	130.959	85.146	83.478	117.348	109.878	0,63
16	MALUT	34.374	14.567	24.357	32.850	39.994	29.228	16,55
Papua								
17	PAPUA	239.265	249.232	189.072	181.773	88.724	189.613	-18,7
18	PAPUA BARAT	81.358	77.108	82.056	81.657	126.711	89.778	13,97

Sumber : Departemen Keuangan, tahun 2010-2014, Dana APBD (berbagai terbitan)

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dari tabel 4.3. dapat kita perhatikan alokasi dana pendidikan tertinggi dicapai oleh propinsi Nangro aceh darusalam, diikuti oleh Riau dan Kaltim. Sedangkan untuk alokasi anggaran terendah dicapai oleh Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Barat.

4. Alokasi Anggaran Kesehatan

Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan pembiayaan bidang kesehatan untuk mendukung hak sehat setiap warga negara dan kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan. Kebijakan pembiayaan kesehatan seyogyanya didukung dengan alokasi anggaran ke daerah yang berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan

dan kecukupan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber penerimaan dan kemampuan penganggaran kesehatan tiap daerah berbeda-beda.

Tabel 4.4. Perkembangan Anggaran Kesehatan di Beberapa Propinsi
Tahun 2010 sd 2014 (Juta Rupiah)

No	Propinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata	
							Anggaran	%
Sumatra								
1	NAD	710.433	798.871	895.106	886.579	1.090.270	876.252	11,63
2	SUMUT	205.169	229.811	263.492	297.944	401.700	279.623	18,64
3	RIAU	271.676	295.892	417.426	538.821	558.365	416.436	20,67
4	SUMSEL	420.049	296.520	266.016	176.775	269.582	285.788	-5,19
5	BENGKULU	144.555	162.300	194.108	219.206	226.135	189.261	11,99
Jawa								
6	JATENG	740.701	922.091	973.038	1.248.836	1.625.098	1.101.953	22,12
7	BANTEN	203.800	270.394	228.645	382.492	395.091	296.084	21,95
Nusa Tenggara								
8	NTB	149.740	199.858	196.141	226.980	392.967	233.137	30,12
9	NTT	132.010	142.069	165.695	177.060	198.570	163.081	10,81
Kalimantan								
10	KALSEL	241.106	361.747	485.830	689.024	1.021.096	559.761	43,59
11	KALTIM	655.609	636.232	807.169	1.154.193	964.480	843.537	12,62
Sulawesi								
12	SULUT	61.959	90.580	96.126	122.589	176.891	109.629	31,04
13	SULTENG	110.723	176.835	166.022	179.235	199.810	166.525	18,26
14	SULBAR	38.323	27.500	39.141	50.404	77.636	46.601	24,22
Maluku								
15	MALUKU	87.061	113.786	117.855	159.181	200.618	135.700	23,84
16	MALUT	57.959	65.664	67.476	90.429	113.277	78.961	18,83
Papua								
17	PAPUA	443.938	475.364	575.941	672.966	649.772	563.596	10,41
18	PAPUA BARAT	91.773	71.846	87.962	82.906	172.643	101.426	25,80

Sumber : Departemen Keuangan, tahun 2010-2014, Dana APBD (berbagai terbitan)

Dari tabel 4.5. dapat kita lihat alokasi anggaran kesehatan tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nangro Aceh Darusallam dan Kalimantan Timur. Sedangkan alokasi anggaran terendah dicapai oleh Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara.

5. Alokasi Anggaran Kelautan dan Perikanan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang dua pertiga luasnya terdiri dari perairan sehingga alokasi dana untuk kelautan dan perikanan harus menjadi prioritas, seperti yang sekarang dijanjikan oleh Jokowi, untuk mengoptimalkan peran sumber daya maritim.

Tabel 4.5. Perkembangan Anggaran Kelautan dan Perikanan di Beberapa Propinsi Tahun 2010 sd 2014 (Juta Rupiah)

No	Propinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata	
							Anggaran	%
Sumatra								
1	NAD	128.029	126.341	164.610	299.537	257.550	195.214	24,23
2	SUMUT	32.199	28.429	72.413	89.082	80.821	60.589	39,19
3	RIAU	40.085	40.054	38.024	61.098	98.010	55.454	28,99
4	SUMSEL	14.289	21.100	26.069	41.752	41.421	28.926	32,65
5	BENGGULU	13.315	11.686	12.694	18.621	22.587	15.781	16,10
Jawa								
6	JATENG	44.833	64.806	72.731	85.337	82.121	69.966	17,59
7	BANTEN	14.710	26.961	24.849	14.090	17.184	19.559	13,53
Nusa Tenggara								
8	NTB	18.726	21.766	33.708	31.178	31.961	27.468	16,53
9	NTT	14.806	19.716	31.477	38.053	52.837	31.378	38,14
Kalimantan								
10	KALSEL	28.736	33.302	27.081	49.650	49.140	37.582	19,88
11	KALTIM	43.619	44.472	58.012	82.423	100.768	65.859	24,18
Sulawesi								
12	SULUT	14.289	21.620	30.109	31.442	47.147	28.921	36,24
13	SULTENG	15.507	29.204	51.915	60.915	71.457	45.800	50,19
14	SULBAR	10.159	17.611	20.528	33.160	53.708	27.033	53,36
Maluku								
15	MALUKU	21.994	40.623	50.187	48.913	74.392	47.222	39,45
16	MALUT	20.000	12.730	20.608	23.184	26.763	20.657	13,37
Papua								
17	PAPUA	31.337	42.133	46.031	52.772	45.796	43.614	11,28
18	PAPUA BARAT	28.781	35.136	41.471	44.438	99.037	49.773	42,53

Sumber : Departemen Keuangan, tahun 2010-2014, Dana APBD (berbagai terbitan)

Dari tabel 4.5 dapat kita perhatikan komitmen tertinggi pemerintah daerah tahun 2010-2014 dalam mendukung kebijakan Jokowi ditunjukkan oleh Provinsi Nangro

Aceh Darusallam (rerata 195,2 Milyar Rupiah). Provinsi Jawa Tengah (rerata 69,9 Milyar Rupiah) dan Provinsi Kalimantan Timur (rerata 65,8 Milyar rupiah) Sedangkan terendah dicapai oleh provinsi Bengkulu (rerata 15,78 Milyar rupiah), Banten (rerata 19,55 Milyar rupiah), dan Maluku Utara (rerarata 20,65 Milyar rupiah)..

6. Alokasi Anggaran Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi kontributor tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lain di Indonesia. Berdasarkan data BPS bulan Februari kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian sebesar 33,2 % dan bulan Agustus 32,88 % lebih besar dibandingkan sektor perdagangan yang hanya sebesar 22,37 %. Karena sektor pertanian menjadi unggulan dalam penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran, sehingga peranan pemerintah sangat dibutuhkan melalui peningkatan sarana dan prasarana.

Tabel 4.6. Perkembangan Anggaran Pertanian di Beberapa Propinsi
Tahun 2010 sd 2014 (Juta Rupiah)

No	Nama Daerah	Alokasi Anggaran Pertanian					Rerata	
		2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	%
Sumatra								
1	N Aceh D	295.091	262.328	328.564	753.582	585.263	444.966	30,29
2	Sumatera Utara	141.240	162.335	178.793	192.783	210.476	177.126	10,52
3	Riau	214.748	125.797	180.621	300.504	324.810	229.296	19,16
4	Sumatera Selatan	94.783	94.260	105.631	174.571	194.256	132.700	22,01
5	Bengkulu	61.029	55.870	65.524	110.570	99.118	78.422	16,80
Jawa								
6	Jawa Tengah	188.687	236.521	269.249	330.147	364.642	277.849	18,06
7	Banten	30.879	37.862	41.628	59.140	84.973	50.896	29,58
Nusa Tenggara								
8	Nusa Tenggara Barat	62.236	69.334	105.251	113.256	154.690	100.954	26,85
9	Nusa Tenggara Timur	76.536	65.996	82.148	105.099	98.588	85.673	8,11
Kalimantan								
10	Kalimantan Selatan	108.081	107.691	133.036	176.222	195.981	144.202	16,71

No	Nama Daerah	Alokasi Anggaran Pertanian					Rerata	
		2010	2011	2012	2013	2014	Anggaran	%
Sumatra								
11	Kalimantan Timur	160.391	128.737	180.961	235.864	306.072	202.405	20,23
Sulawesi								
12	Sulawesi Utara	61.403	69.568	90.948	105.510	108.063	87.098	15,62
13	Sulawesi Tengah	54.218	75.006	133.846	197.416	196.758	131.449	40,99
14	Sulawesi Barat	34.778	47.070	71.545	82.022	85.646	64.212	26,60
Maluku								
15	Maluku	36.987	41.349	46.525	62.077	84.198	54.227	23,34
16	Maluku Utara	11.133	18.584	32.543	42.571	49.843	30.935	47,48
Papua								
17	Papua	81.198	97.380	104.556	144.383	137.703	113.044	15,19
18	Papua Barat	28.647	28.874	35.609	47.547	77.903	43.716	30,37

Sumber : Departemen Keuangan, tahun 2010-2014, Dana APBD (berbagai terbitan)

Dari tabel 4.6 dapat kita lihat bahwa propinsi yang memiliki komitmen dalam sektor pertanian adalah Nangro Aceh Darussalam (rerata pengeluaran untuk sektor pertanian sebesar 444,9 milyar rupiah), Riau (rerata pengeluaran untuk sektor pertanian sebesar 229,2 milyar rupiah), dan Jawa Tengah (rerata pengeluaran untuk sektor pertanian sebesar 277,8 milyar rupiah). Sedangkan sektor pertanian yang tidak menjadi prioritas adalah Maluku Utara (rerata pengeluaran untuk sektor pertanian sebesar 30,9 milyar rupiah), Papua Barat (rerata pengeluaran untuk sektor pertanian sebesar 43,7 milyar rupiah), dan Propinsi Banten (rerata pengeluaran untuk sektor pertanian sebesar 50,8 milyar rupiah),

7. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tabel 4.6 Perkembangan Dana Alokasi Umum di Beberapa Propinsi Tahun 2010 sd 2014 (Juta Rupiah)

No	Propinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata	
							Anggaran	%
Sumatra								
1	NAD	621.432	716.646	911.080	1.292.445	1.201.612	948.643	19,32
2	SUMUT	792.119	948.867	1.103.389	1.223.445	1.349.132	1.083.390	14,31
3	RIAU	58.869	380.051	489.179	726.630	820.984	495.143	158,96
4	SUMSEL	507.356	646.813	716.153	870.516	985.542	745.276	18,24
5	BENGGKULU	523.041	607.388	775.311	854.647	955.095	743.096	16,44
Jawa								
6	JATENG	1.168.788	1.276.180	1.516.892	1.670.859	1.803.931	1.487.330	11,54
7	BANTEN	381.979	460.333	530.833	671.081	728.490	554.543	17,70
Nusa Tenggara								
8	NTB	602.389	646.671	809.617	859.353	980.300	779.666	13,19
9	NTT	674.636	940.646	940.646	1.003.991	1.131.687	938.321	14,72
Kalimanta								
10	KALSEL	483.365	504.876	652.535	683.511	701.725	605.202	10,28
11	KALTIM	0	51.446	52.637	55.539	57.312	43.387	3,67
Sulawesi								
12	SULUT	558.635	619.711	790.534	885.684	949.852	760.883	14,44
13	SULTENG	659.331	743.161	902.087	981.035	1.053.636	867.850	12,56
14	SULBAR	405.750	441.578	590.680	685.497	776.214	579.944	17,97
Maluku								
15	MALUKU	607.572	703.993	829.491	897.657	1.019.704	811.683	13,88
16	MALUT	479.727	540.389	703.159	772.591	906.623	680.498	17,50
Papua								
17	PAPUA	1.058.228	1.276.285	1.569.782	1.889.267	1.991.202	1.556.953	17,34
18	PAPUA BARAT	605.900	700.444	901.398	1.064.872	1.122.264	878.976	16,95

Sumber : Departemen Keuangan, tahun 2010-2014, Dana APBD (berbagai terbitan)

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada di setiap masing-masing wilayah/daerah.

Dari tabel 4.6 dapat kita lihat, Dana alokasi Umum paling tinggi diterima dari pemerintah pusat kepada provinsi Papua, Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara, sedangkan terendah diterima oleh provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau dan provinsi Banten.

8. Opini BPK terhadap LKPD

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat

(1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas dalam pengendalian intern.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, paragraf 13 tentang Jenis Opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, sebagai berikut:

1. **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.
2. **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. **Tidak Wajar (TW)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
4. **Pernyataan Menolak Memberikan Opini** atau **Tidak Memberikan Pendapat (TMP)** menyatakan bahwa pemeriksaan tidak menyatakan opini.

Tabel 4.7. Perkembangan Opini BPK terhadap 18 LKPD Propinsi

No	Nama Daerah	Opini				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	N Aceh D	3	3	3	3	3
2	Sumatera Utara	3	3	3	3	3
3	Riau	5	3	3	4	4
4	Sumatera Selatan	3	3	3	3	3
5	Bengkulu	3	3	5	5	5
6	Jawa Tengah	3	4	5	4	5
7	Banten	3	3	3	1	3
8	Nusa Tenggara Barat	1	5	5	5	5
9	Nusa Tenggara Timur	3	3	3	3	3
10	Kalimantan Selatan	3	3	3	3	5
11	Kalimantan Timur	3	3	5	5	5
12	Sulawesi Utara	5	3	4	4	5
13	Sulawesi Tengah	3	3	4	3	4
14	Sulawesi Barat	3	3	3	3	3
15	Maluku	1	1	1	3	3
16	Maluku Utara	1	1	1	1	1
17	Papua	1	1	1	3	3
18	Papua Barat	1	1	1	1	1

Sumber : Badan Pemerisa Keuangan, Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan, Tahun 2010-2014.

Berdasarkan tabel 4.7 opini BPK terhadap LKPD di 18 propinsi dinyatakan dalam bentuk skor, angka 1 menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di beri opini TMP, angka 2 menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di beri opini TW, angka 3 menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di beri opini WDP, angka 4 menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di beri opini WDP-DPP dan angka 5 menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah di beri opini WDP. Skor tertinggi di peroleh oleh Bengkulu, Jawa Tengah, NTB, Kalsel, Kaltim dan Sulawesi Utara. Sedangkan terendah diperoleh Papua dan Maluku Utara.

B. Hasil Regresi

1. Uji Asumsi Klasik

Tidak ada satu aturan yang kuat dan ketat untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Walaupun demikian, para ahli ekonometrika menyarankan beberapa metode untuk dapat mendeteksi ada-tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam model empiris, seperti dengan menggunakan uji Park tahun 1966 (Gujarati, 2003, 403), uji Glejser (Gujarati, 2003; 405), Uji Spearman's Ranking Correlation (Gujarati, 2003; 406), uji Breusch-Pagan-Godfre (Gujarati, 2003; 411).

Berikut ini output hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.7.
Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park

Variable	t-Statistic	Prob.
C	-0.603026	0.5486
LOG(JP?)	0.543671	0.5886
LOG(PEDU?)	-0.705324	0.4832
LOG(PKES?)	1.304793	0.1966
LOG(PKEL?)	-0.126348	0.8999
LOG(PPERT?)	-0.541442	0.5901
LOG(DAU?)	-0.367563	0.7144
LOG(PMA?)	-0.421881	0.6745
OPINI?	-0.358051	0.7215

Sumber : Lampiran

Keterangan :

*** = signifikan 1%

** = signifikan 5%

* = signifikan 10%

Dari tabel 4, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sebagai variabel independen terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara variabel-variabel bebas dalam model regresi berganda ditemukan adanya korelasi (hubungan) antara satu

dengan yang lain. Masalah Multikolinieritas hanya berkaitan dengan adanya hubungan linier di antara variabel-variabel bebas. Artinya bahwa masalah Multikolinieritas tidak akan terjadi dalam model regresi yang bentuk fungsinya berbentuk non-linier, tetapi masalah Multikolinieritas akan muncul dalam model regresi yang bentuk fungsinya berbentuk linier di antara variabel-variabel bebas (Gujarati, 2003; 348).

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ini ditemukan adanya korelasi tersebut. Apabila terjadi multikolinieritas, maka koefisien regresi dari variabel bebas akan tidak signifikan dan mempunyai *standard error* yang tinggi. Semakin kecil korelasi antar variabel bebas, maka model regresi akan semakin baik.

Dari lampiran dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasinya antar variabel independen tidak lebih besar dari [0,9] dengan demikian data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinieritas.

2. Analisis Model Terbaik

Dalam analisa model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary/pooled least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Pengujian statistik untuk memilih model pertama kali adalah dengan melakukan uji Chow untuk menentukan apakah metode *Pooled least square* atau *Fixed effect* yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel.

Pemilihan model ini menggunakan uji analisis terbaik selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut.

TABEL 4.8

Hasil Estimasi Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran Kesehatan, Pengeluaran kelautan, Pengeluaran Pertanian, DAU, PMA dan Opini BPK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 18 Propinsi

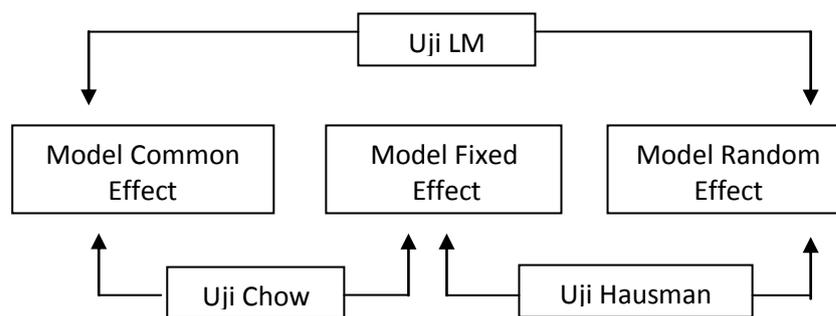
Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi (LOG(PDRB))	Model		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
Konstanta		7,593	0.678197
Standar error		1.361.163	1.339.923
Probabilitas		0.0000****	0.6141
LOG(JP)	0.874787	0.443728	0.932107
Standar error	0.060612	0.096728	0.093540
Probabilitas	0.0000****	0.0000****	0.0000****
LOG(PEDU)	0.360223	-0.017859	0.015832
Standar error	0.069510	0.011527	0.021943
Probabilitas	0.0000****	0.1263*	0.4727
LOG(PKES)	-0.252884	0.051847	0.044550
Standar error	0.093297	0.014366	0.029561
Probabilitas	0.0082****	0.0006****	0.1357*
LOG(PKEL)	0.142634	0.087515	0.096766
Standar error	0.100167	0.009998	0.024224
Probabilitas	0.1583*	0.0000****	0.0001****
LOG(PPERT)	0.166637	0.087475	0.077440
Standar error	0.132799	0.015670	0.029241
Probabilitas	0.2131	0.0000****	0.0097****
LOG(DAU)	-0.227566	0.041599	-0.025898
Standar error	0.048809	0.023221	0.025379
Probabilitas	0.0000****	0.0780**	0.3106
LOG(PMA)	0.167081	-0.003170	0.008910
Standar error	0.023529	0.002888	0.007759
Probabilitas	0.0000****	0.2765	0.2542
OPINI	0.007336	-0.011929	-0.021423
Standar error	0.044660	0.005130	0.008225
Probabilitas	0.8699	0.0232***	0.0109***
R²	0.917027	0.999712	0.785981
F_{statistik}		8886.339	37.18388
Probabilitas		0.000000****	0.000000****

Sumber: Data diolah

Keterangan :

- **** = signifikan 1%
- *** = signifikan 5%
- ** = signifikan 10%
- * = signifikan 20%

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan *Uji Likelihood* dan *Hausman Test* keduanya menyarankan untuk menggunakan *Fixed Effect*, dan dari perbandingan uji pemilihan terbaik maka model regresi yang digunakan dalam mengestimasi pengaruh jumlah penduduk, alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, dana alokasi umum, penanaman modal asing dan opini bpk terhadap pertumbuhan ekonomi adalah *Fixed Effect Model*. Dipilihnya *Fixed Effect Model* karena memiliki probabilitas masing-masing variabel independen dari *Fixed Effect Model* lebih signifikan dibanding *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* yang masing-masing variabel independennya tidak signifikan sehingga model yang lebih baik yaitu *Fixed Effect Model*.



Sumber : Gujarati, 2003

Gambar 4.1. Uji Seleksi Model

Pemilihan metode pengujian data panel dilakukan pada seluruh data sample, uji Chow dilakukan untuk memilih metode pengujian data panel antara metode *Pooled least square* atau *Fixed Effect*. Jika nilai F statistik pada uji Chow signifikan, maka uji Hausman akan dilakukan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Hasil uji Hausman dengan nilai probabilitas yang kurang dari Alpha adalah signifikan, artinya metode *Fixed Effect* yang dipilih untuk mengolah data panel. Pemilihan metode pengujian dilakukan dengan menggunakan pilihan *Fixed*

Effect dan *Random Effect* serta mengkombinasikan, baik *cross-section*, *period*, maupun gabungan *cross-section/period*.

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model Random Effect atau model Common Effect (OLS) yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi Random Effect didasarkan pada nilai residual dari metode OLS (Gujarati, 2003).

a. Uji Chow (Uji likelihood)

Uji Chow merupakan uji untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Common/Pool Effect Model*. Jika hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah *Common Effect Model*. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*, dan pengujian akan berlanjut ke uji Hausman.

$$\begin{aligned}
 F_{n-1,nt,n-k} &= \frac{(10,68703 - 0,159485)/(18-1)}{0,159485/(90-18-8)} \\
 &= 10,619267/0,002492 \\
 &= 248,5068
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F\text{-tabel} &= \alpha ; df (n-1, nT-n-k) \\
 &= 5\% ; (18 - 1, 90 - 18 - 8) \\
 &= 5\% ; (17, 64) \\
 &= 1,834
 \end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan F-hitung didapat sebesar 248,5068 sedangkan F-tabel dari numerator 17 dan denumenator 64 pada α : 5% adalah 1,834. Dari hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena F-hitung lebih besar dari F-tabel

(1975,443 > 1,649), sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah **Fixed Effect Model**.

Berdasarkan tabel Uji Chow diatas, kedua nilai probabilitas *Cross Section F* dan *Chi Square* yang lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi menurut Uji Chow, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode *Fixed effect*. Berdasarkan hasil Uji Chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian data berlanjut ke Uji Hausman.

b. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian untuk menentukan penggunaan metode antara *Random Effect* dengan *Fixed Effect*. Jika dari hasil Uji Hausman tersebut menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model *Random Effect*. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

TABEL 4.9
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq.d.f	Prob.
Cross-section random	29.752435	8	0.0002

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel UjiHausman, nilai probabilitas *Cross-section random* adalah 0,0002 yang lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi menurut uji Hausman, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan **metode *Fixed Effect***.

c. Uji LM

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares maka kita menolak hipotesis nul, yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode Random Effect dari pada metode *Common Effect*. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nul, yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah metode *Common Effect* bukan metode *Random Effect* (Widarjono, 2009).

Pada kesempatan ini uji LM tidak digunakan karena pada uji Chow dan uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *Fixed Effect Model*. Uji LM dipakai manakala pada uji Chow menunjukkan model yang dipakai adalah *Common Effect Model*, sedangkan pada uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *Random Effect Model*. Maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir untuk menentukan model *Common Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat.

3. Hasil Estimasi Model Data Panel Fixed Effect Model (FEM)

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari perbandingan nilai terbaik maka model regresi yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. *Fixed Effect Model* (FEM) adalah teknik estimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk mengetahui adanya perbedaan *intercept* antar *cross section*. Berikut tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 18 propinsi selama periode 2010-2014 (5 tahun).

TABEL 4.10
Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi (LOG(PDRB))	Model Fixed Effect
Konstanta	7,593
Standar error	1.361.163
Probabilitas	0.0000****
LOG(JP)	0.443728
Standar error	0.096728
Probabilitas	0.0000****
LOG(PEDU)	-0.017859
Standar error	0.011527
Probabilitas	0.1263*
LOG(PKES)	0.051847
Standar error	0.014366
Probabilitas	0.0006****
LOG(PKEL)	0.087515
Standar error	0.009998
Probabilitas	0.0000****
LOG(PPERT)	0.087475
Standar error	0.015670
Probabilitas	0.0000****
LOG(DAU)	0.041599
Standar error	0.023221
Probabilitas	0.0780**
LOG(PMA)	-0.003170
Standar error	0.002888
Probabilitas	0.2765
OPINI	-0.011929
Standar error	0.005130
Probabilitas	0.0232***
R²	0.999712
F_{statistik}	8886.339
Probabilitas	0.000000****

Sumber: Hasil Pengolahan data panel

Dari hasil estimasi diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

$$\text{LOG (PDRB)} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{LOG(JP)} + \beta_2 \cdot \text{LOG(PEDU)} + \beta_3 \cdot \text{LOG(PKES)} + \beta_4 \cdot \text{LOG(PKEL)} + \beta_5 \cdot \text{LOG(PPERT)} + \beta_6 \cdot \text{LOG(DAU)} + \beta_7 \cdot \text{LOG(PMA)} + \beta_8 \cdot \text{OPINI} + \text{et}$$

Keterangan:

LOG(PDRB)	= Produk Domestik Regional Bruto
LOG(JP)	= Jumlah Penduduk
LOG(PEDU)	= Pengeluaran Pemerintah Untuk Sektor Pendidikan
LOG(PKES)	= Pengeluaran Pemerintah Untuk Sektor Kesehatan
LOG(PKEL)	= Pengeluaran Pemerintah Untuk Sektor Kelautan
LOG(PPERT)	= Pengeluaran Pemerintah Untuk Sektor Pertanian
LOG(DAU)	= Dana Alokasi Umum
LOG(PMA)	= Penanaman Modal Asing
OPINI	= Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_8$	= Koefisien Parameter
et	= Disturbance Error

Dimana diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

$$\text{LOG (PDRB)} = 7,59 + 0,4437 \text{ LOG(JP)} - 0,0178 \text{ LOG(PEDU)} + 0,0518 \text{ LOG(PKES)} + 0,0875 \text{ LOG(PKEL)} + 0,0874 \text{ LOG(PPERT)} + 0,0415 \text{ LOG(DAU)} - 0,0031 \text{ LOG(PMA)} - 0,0119 \text{ OPINI} + \text{et}$$

Dimana :

****	dimana signifikan pada alpha 1 persen
***	dimana signifikan pada alpha 5 persen
**	dimana signifikan pada alpha 10 persen
*	dimana signifikan pada alpha 20 persen

Dari hasil regresi data panel model fixed effect dapat dilihat dari nilai *Prob (t-stat)* yang kurang dari 0.01 (untuk jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, dana alokasi umum). Dengan tingkat keyakinan 95 persen, hampir seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel yang signifikan ditandai oleh prob t-statistik (sebagai **partial test**) yang kurang dari 0.05. Sehingga dengan tingkat keyakinan 90 persen variabel yang tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi adalah variabel alokasi anggaran pendidikan dan penanaman modal asing tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan model dapat menjelaskan 99,96 persen variasi yang terjadi pada variabel PDRB (*adjusted R-squared*).

β_1 : 0,4437 artinya jika faktor lain dianggap tetap maka kenaikan 1 persen jumlah penduduk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,44 persen. Kenaikan pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan peningkatan pendapatan perkapita, salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah dengan mengurangi laju perkembangan penduduk.

β_2 : -0,0178 artinya jika faktor lain dianggap tetap maka kenaikan 1 persen pengeluaran pemerintah untuk pendidikan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,018 persen. Jika dilihat hasilnya yang negatif mengindikasikan bahwa anggaran pembangunan bidang pendidikan kurang tepat sasaran sehingga pemerintah perlu mengevaluasi kembali pengembangan kurikulum dan sarana prasarana pendidikan.

β_3 : 0,05186 artinya jika faktor lain dianggap tetap maka kenaikan 1 persen pengeluaran pemerintah bidang kesehatan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,052 persen. Peningkatan anggaran kesehatan akan memperluas pelayanan bidang kesehatan masyarakat, dan meningkatkan sumber daya manusia, dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas.

β_4 : 0,0875 artinya jika faktor lain dianggap tetap maka kenaikan 1 persen pengeluaran pemerintah untuk kelautan dan perikanan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08 persen. Indonesia 2/3 wilayahnya terdiri

dari perairan, sehingga peningkatan sarana dan prasarana kemaritiman dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

β_5 : 0,087 artinya jika faktor lain dianggap tetap maka kenaikan 1 persen pengeluaran untuk sektor pertanian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,087 persen. Indonesia hampir 35 persen masyarakatnya mengandalkan sektor pertanian, sehingga dukungan pendanaan pemerintah melalui peningkatan sarana dan prasarana pertanian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

β_6 : 0,041 artinya jika faktor lain dianggap tetap maka kenaikan 1 persen dana alokasi umum akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,041 persen. **Dana Alokasi Umum** (DAU) adalah Sejumlah **dana** yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai **dana** pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Peningkatan DAU berarti menambah dana pembangunan, dan berakibat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

β_7 : -0,0032 artinya artinya jika faktor lain dianggap tetap maka kenaikan 1 persen penanaman modal asing akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0032 persen. Tetapi berdasarkan hasil statistik variabel penanaman modal asing tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

β_8 : -0,0119 artinya opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan negatif, artinya semakin buruk opini BPK terhadap LKPD semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

4. Hasil Analisis Output

a. Hubungan Antara Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah propinsi di Indonesia. Secara tradisional pertumbuhan penduduk sebagai salah satu faktor positif yang mengacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kevin Sylwester (2000), Rustam A (2013) dan penelitiannya Naftaly Gisore.

Kebijakan memperlambat laju pertumbuhan jumlah penduduk ditujukan dalam jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan absolut, memperkecil ketidakmerataan pendapatan, memperluas kesempatan mengenyam pendidikan terutama kaum wanita, meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan, menambah sarana prasarana kesehatan serta menciptakan jasa-jasa pelayanan sosial secara lebih merata.

b. Hubungan Antara Anggaran Pendidikan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti bahwa alokasi pendidikan tidak bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan tetapi hanya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Artinya selama ini peningkatan alokasi dana pendidikan sebagian besar digunakan untuk sertifikasi dan operasional sekolah. Gagasan-gagasan yang keliru telah dilakukan di

beberapa propinsi di Indonesia yang menyatakan penciptaan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang cepat secara kuantitatif merupakan kunci utama mensukseskan pembangunan nasional, semakin bertambah kesempatan pendidikan, akan semakin cepat pula proses pembangunannya. Bertolak dari pendapat tersebut daerah berlomba-lomba untuk mengadakan perluasan pendidikan dalam waktu singkat, sehingga bidang ini menjadi semakin sensitif secara politis. Setiap dilakukan pemilihan kepala daerah selalu dimunculkan pendidikan gratis. Perluasan kesempatan pendidikan secara cepat telah menelan biaya yang sangat besar, akan tetapi rata-rata kondisi masyarakat justru mengalami kesenjangan pembangunan.

Negara kita dihadapkan pada dua alternatif pokok atas kebijakan dalam rangka menghadapi masalah pendidikan, yaitu pertama memperluas sistem pendidikan formal secara kuantitatif dengan beberapa modifikasi kecil-kecilan baik dalam kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi tanpa mengubah kebijaksanaan pendidikan yang memakan banyak biaya maupun struktur kelembagaan pasar tenaga kerjanya. Kedua, mencoba mereformasikan seluruh sistem pendidikannya, disertai dengan perubahan terhadap kondisi-kondisi permintaan dan penawaran kesempatan bersekolah dan mengarahkan kembali kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan nasional yang sebenarnya. Bukti-bukti menunjukkan bahwa alternatif pertama hanya akan memperburuk masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan stagnasi perekonomian desa.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Adela Shera dkk (2014) bahwa belanja untuk pendidikan memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika alpha yang kita gunakan 10 persen maka belanja

pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, ini sesuai dengan penelitian David E Bloom dkk (2010), Adewara Sunday Olabisi dkk (2012), Naftaly Gisore (2014) dan Ali Sulieman Al-Shafti yang menyatakan bahwa belanja pendidikan tidak memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

c. Hubungan Antara Anggaran Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan angka probabilitas t hitung yang lebih kecil dari 0,05. Dan ini membuktikan bahwa peningkatan belanja kesehatan akan menyebabkan pengurangan angka kematian bayi dan ibu melahirkan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping itu dengan adanya Indonesia sehat dapat mendorong produktivitas, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Hubungan Antara Anggaran Kelautan dan Perikanan dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Pengeluaran Pemerintah Untuk alokasi Kelautan dan Perikanan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan angka probabilitas t hitung yang lebih kecil dari 0,05. Karena 2/3 bagian negara kita berwujud lautan maka alokasi pengeluaran pemerintah akan mengoptimalkan sumber daya dibidang kelautan dan perikanan, sehingga sektor kemaritiman akan berkembang.

e. Hubungan Antara Anggaran Pertanian dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pembangunan untuk pertanian memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 18 propinsi di Indonesia. Tujuan pembangunan pertanian di Indonesia adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat pedesaan melalui peningkatan pendapatan, total produksi, dan produktivitas petani kecil, maka pertama-tama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan identifikasi sumber-sumber pokok kemajuan pertanian dan kondisi-kondisi dasar yang sekiranya akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pengembangan sektor pertanian, semua unsur-unsur penting tersebut jelas berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu jalinan hubungan yang amat kompleks. Untuk memudahkan pemahaman dapat kita bagi ke dalam tiga komponen sumber-sumber kemajuan pertanian berskala kecil, yaitu : (1) peningkatan kemajuan teknologi dan inovasi dalam kegiatan pertanian merupakan prasyarat penting yang harus dipenuhi demi tercapainya perbaikan tingkat output dan produktivitasnya, (2) Kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat seperti kebijakan pengaturan dan perlindungan harga-harga komoditas pertanian, terutama biji-bijian bahan pangan pokok. (3) *Land Reform*, pembangunan sektor pertanian dan pedesaan hanya akan berhasil membawa manfaat bagi banyak orang apabila ada usaha bersama antara pihak pemerintah dan semua petani terutama pemberian dan perbaikan hak kepemilikan atau penggunaan lahan kepada masing-masing petani. Jika program-program land reform benar-benar dapat diperlakukan dan dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah maka akan tercipta landasan yang kokoh bagi peningkatan output dan standar hidup para petani pedesaan.

f. Hubungan Antara Dana alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan angka probabilitas t hitung yang lebih kecil dari 0,05. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama sebagai pelengkap dana dalam pembangunan daerah.

g. Hubungan Antara Penanaman Modal Asing dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Investasi Asing (PMA) tidak memiliki hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan angka probabilitas t hitung yang lebih besar dari 0,20. Dalam teori pembangunan ekonomi, Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus $PDB = C + I + G + (X-M)$. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya $I = (Y,i)$. Hal ini dapat kita lihat bahwa selama ini penanaman modal asing di Indonesia lebih banyak mengeksplorasi sumber daya alam, dan daerah yang hanya mengandalkan sumber daya alam pertumbuhannya rata-rata

rendah, sehingga pemerintah harus membuat kebijakan menaikkan nilai tambah dari produk hasil alam, sehingga peranan investasi dapat betul-betul dioptimalkan. Penelitian ini didukung oleh Adewara Sunday Olabisi, dkk (2012) dan Basem Mohammed Louzi dan Abeer Abadi (2011) yang menyatakan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kritik terhadap penanaman modal asing banyak dilakukan terutama dampaknya terhadap pembangunan di Indonesia sangat tidak merata dan dalam banyak hal kegiatan-kegiatan perusahaan penanaman modal asing memperkuat struktur ekonomi yang dualistik dan memperburuk distribusi pendapatan. Mereka akan mengalihkan sumberdaya dari penggunaan untuk menghasilkan bahan-bahan makanan ke penggunaan untuk menghasilkan barang-barang yang canggih yang kebanyakan hanya memuaskan kelompok tertentu dan cenderung memperburuk ketidak seimbangan kesempatan yang bersifat ekonomis antara desa dan kota dengan kebanyakan beroperasi di daerah perkotaan dan mempercepat arus urbanisasi dari desa ke kota. Perusahaan penanaman modal asing cenderung menghasilkan barang yang tidak cocok (hanya dikonsumsi kelompok tertentu), sehingga mendorong pola konsumsi mewah melalui iklan dan barang yang dihasilkan cenderung menggunakan teknologi padat modal. Sehingga sumberdaya dalam negeri cenderung untuk dialokasikan kepada proyek-proyek yang secara sosial tidak menguntungkan.

h. Hubungan Antara Opini BPK dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Opini BPK terhadap LPKD memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan angka probabilitas t hitung yang lebih kecil dari 0,05. Selama ini pemerintah daerah belum

mengoptimalkan anggaran berbasis kinerja, yang dilaksanakan hanya sebatas penyerapan anggaran, dan ini belum berdampak pada outcome dari masing-masing program yang dilaksanakan. Penelitian ini didukung oleh Mauro (1995), Pertama, praktek korupsi yang dengan pemberian dana untuk mempercepat sesuatu urusan (*speed money*) sehingga memungkinkan pelaku ekonomi terhindar dari penundaan-penundaan urusannya. Sebagaimana diketahui, terhindar penundaan bagi aktivitas ekonomi berarti biaya, baik itu dari sisi peluang usaha yang mungkin lepas, ataupun biaya-biaya dari bunga, dan ongkos lainnya. Ini dapat mendukung pertumbuhan apabila negara tersebut aturan birokrasinya sangat buruk. Kedua, adanya korupsi ini dapat mendorong pegawai pemerintah untuk bekerja lebih keras. Mereka yang sebelumnya tidak terlalu bersemangat menyelesaikan urusan rutinnnya menjadi terstimulasi untuk bekerja karena adanya insentif dari uang pelayanannya. Hal yang seperti ini dapat terjadi di negara manapun.

Untuk menghindari korupsi perlu mengoptimalkan lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk ada kecenderungan semakin banyak kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan, yang melibatkan para pejabat tinggi negara. Namun demikian dapat diduga masih lebih banyak yang belum ketahuan ketimbang yang sampai berurusan dengan pihak berwajib. Korupsi yang muncul ke permukaan dan menjadi diskusi publik sangat sedikit, namun yang tidak terlihat jauh lebih besar. Fenomena yang kedua adalah fenomena tuyul: kehilangan dan kerugian negara jelas terjadi dan sangat besar, namun pelakunya nyaris tak pernah kelihatan dan sulit sekali diungkap. Masyarakat sepertinya pasrah dan

nrimo, membiarkan kehilangan terus berlanjut karena tidak bisa berbuat apa-apa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan tidak memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Pengeluaran Pemerintah Untuk alokasi Kelautan dan Perikanan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Pengeluaran Pemerintah Untuk alokasi Pertanian memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Investasi Asing (PMA) tidak memiliki hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
8. Opini BPK terhadap LPKD memiliki hubungan nehgatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Kontribusi dan Implikasi

1. Secara Teoritis

Dari hasil Temuan penelitian yang merupakan kontribusi hasil penelitian ini dalam bidang akademis dapat dilihat dari hasil analisis pengaruh komposisi belanja pemerintah (pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, serta dana alokasi umum). Pertama, dari komponen belanja pemerintah tersebut belanja pemerintah untuk kelautan dan perikanan memiliki kontribusi terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia, dan ini sesuai dengan bentuk negara kita yang terdiri dari banyak pulau serta 2/3 luas wilayahnya perairan. Sehingga kebijakan Presiden Jokowi tentang prioritas pengembangan kemaritiman sangat sesuai. Kedua komponen belanja pemerintah untuk pertanian memberi kontribusi kedua setelah belanja kelautan dan perikanan, ini juga sangat sesuai dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, 35 persen serapan tenaga kerja ada di sektor pertanian, sehingga prioritas pembangunan pertanian atau program kembali ke desa yang dilakukan pemerintah sudah tepat,

2. Implikasi Praktis

Kontribusi dan implikasi yang sifatnya praktis disumbangkan bagi pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan atau pihak lain yang berkepentingan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

- a. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali pendidikan dasar dalam hal kurikulum, metode pengajaran, serta evaluasi pendidikan. Sehingga tidak hanya mengejar kuantitas tetapi juga tetap menjaga kualitas pendidikan dasar.

- b. Penanaman modal asing tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perusahaan penanaman modal asing cenderung menghasilkan barang yang tidak cocok (hanya dikonsumsi kelompok tertentu), sehingga mendorong pola konsumsi mewah melalui iklan dan barang yang dihasilkan cenderung menggunakan teknologi padat modal. Sehingga sumberdaya dalam negeri cenderung untuk dialokasikan kepada proyek-proyek yang secara sosial tidak menguntungkan. Pemerintah melalui Badan koordinasi Penanaman Modal harus dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga PMA yang masih tidak langsung kita terima tetapi diseleksi terlebih dahulu apakah ke depan akan menguntungkan untuk masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Opini BPK terhadap LPKD memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menemukan semakin jelek opini BPK terhadap LKPD pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Artinya semua urusan yang berhubungan dengan kepentingan umum harus disertai dengan uang, hal ini diakibatkan berbelit-belitnya prosedur pengurusannya. Pemerintah perlu mempermudah prosedur dan mengoptimalkan peran KPK, serta pengawasan melekat terhadap instansi yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum.

C. Saran

1. Bagi Pengambil Kebijakan

- a. Dalam penelitian ini alokasi anggaran untuk pendidikan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi, berarti bahwa alokasi pendidikan tidak bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan tetapi hanya meningkatkan

kesejahteraan tenaga pendidik. Artinya selama ini peningkatan alokasi dana pendidikan sebagian besar digunakan untuk sertifikasi dan operasional sekolah. Pemerintah perlu melakukan dua alternatif pokok atas kebijakan dalam rangka menghadapi masalah pendidikan, yaitu pertama memperluas sistem pendidikan formal secara kuantitatif dengan beberapa modifikasi kecil-kecilan baik dalam kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi tanpa mengubah kebijaksanaan pendidikan yang memakan banyak biaya maupun struktur kelembagaan pasar tenaga kerjanya. Kedua, mencoba mereformasikan seluruh sistem pendidikannya, disertai dengan perubahan terhadap kondisi-kondisi permintaan dan penawaran kesempatan bersekolah dan mengarahkan kembali kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan nasional yang sebenarnya. Bukti-bukti menunjukkan bahwa alternatif pertama hanya akan memperburuk masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan stagnasi perekonomian desa.

- b. PMA belum memberikan peran besar dalam pembangunan ekonomi, hal ini dapat kita lihat bahwa selama ini penanaman modal asing di Indonesia lebih banyak mengeksplorasi sumber daya alam, dan daerah yang hanya mengandalkan sumber daya alam pertumbuhan ekonominya rata-rata rendah, sehingga pemerintah harus membuat kebijakan menaikkan nilai tambah dari produk hasil alam, sehingga peranan investasi dapat betul-betul dioptimalkan. Kritik terhadap penanaman modal asing banyak dilakukan terutama dampaknya terhadap pembangunan di Indonesia sangat tidak merata dan dalam banyak hal kegiatan-kegiatan perusahaan penanaman modal asing memperkuat struktur ekonomi yang dualistik dan memperburuk distribusi pendapatan. Mereka akan mengalihkan sumberdaya dari penggunaan untuk

menghasilkan bahan-bahan makanan ke penggunaan untuk menghasilkan barang-barang yang canggih yang kebanyakan hanya memuaskan kelompok tertentu dan cenderung memperburuk ketidak seimbangan kesempatan yang bersifat ekonomis antara desa dan kota dengan kebanyakan beroperasi di daerah perkotaan dan mempercepat arus urbanisasi dari desa ke kota. Perusahaan penanaman modal asing cenderung menghasilkan barang yang tidak cocok (hanya dikonsumsi kelompok tertentu), sehingga mendorong pola konsumsi mewah melalui iklan dan barang yang dihasilkan cenderung menggunakan teknologi padat modal. Sehingga sumberdaya dalam negeri cenderung untuk dialokasikan kepada proyek-proyek yang secara sosial tidak menguntungkan. Sehingga untuk menghindari dampak buruk penanaman modal asing maka pemerintah harus selektif memilih penanaman modal asing terutama yang menggunakan teknologi padat karya, dan cenderung produk yang dihasilkan untuk kepentingan masyarakat banyak,

- c. Peran pemerintah harus dioptimalkan melalui monitoring anggaran belanja, yaitu bahwa uang yang berasal dari APBD adalah uang rakyat, sehingga harus digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Selama ini pemerintah daerah belum mengoptimalkan anggaran berbasis kinerja, yang dilaksanakan hanya sebatas penyerapan anggaran, dan ini belum berdampak pada *outcome* dari masing-masing program yang dilaksanakan. Selain mengoptimalkan dan monitoring anggaran berbasis kinerja, pemerintah perlu melakukan transparansi semua hal yang menyangkut kebijakan ekonomi. Transparansi memungkinkan masyarakat luas untuk ikut ambil bagian dalam memberikan kontribusi positif bagi kebijakan pemerintah, sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan dalam pemerintahan. Informasi terkait

kebijakan yang diambil merupakan input bagi kontrol politik terhadap kebijakan sektor publik sekaligus bahan evaluasi dan monitoring. Transparansi menjamin hak atas berbagai informasi yang membantu mencegah penggunaan informasi oleh individu atau kelompok untuk kepentingan pribadi, demi keuntungan politik, maupun ekonomi (OECD, 2003). Bagi masyarakat negara miskin atau berkembang, transparansi merupakan instrumen penting bagi upaya meningkatkan harkat hidup rakyat. Kemiskinan pada dasarnya merupakan fenomena multi dimensi yang mencakup berbagai hal antara lain kurangnya akses pada pelayanan dasar (seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan lain-lain), hak-hak dasar warganegara, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan manusia. Maraknya korupsi selanjutnya membawa dampak pada makin lemahnya pilar-pilar pembangunan manusia, terabaikannya hak-hak asasi manusia, dan kerangka perundangan yang dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat tersebut (Tranparency International, 2011).

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Terbatasnya wilayah propinsi dalam penelitian yang membawa konsekuensi generalisasi hasil penelitian menjadi terbatas pula maka kepada peneliti berikutnya diharapkan untuk meliputi seluruh wilayah propinsi yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu diharapkan pula menggunakan indikator korupsi yang lebih tepat sehingga peranan korupsi di negeri ini yang sudah mengakar dapat dipotret menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, 2002, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Pertama, penerbitEkonomisia, Yogyakarta
- .Adela Shera dkk, 2014, Corruption impact on economic growth : an empirical analisis, *Journal of economic development, management, IT, Finance and Marketing*, 6(2), P. 57-77, Sep 2014.
- Adela Shora dkk, 2014, Coruption Impact on economic Growth : An Empirical Analysis, *Journal of economics Development IT, finance and marketing*, 6 (2), P. 57-77
- Adewara Sunday Olabisi dkk, 2012, Composition of Public Expenditure and economic Growth in Nigeria, *Journal of Emerging trends in Economic and management Sciences (JETEMS)* 3(4), P. 403-407
- Agnes Lutherani CPL, 2013, *Analisis Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Propinsi Sulawesi Utara*, Disertasi (tidak dipublikasikan) Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanudin, Makasar.
- Agus Widarjono. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga. EKONISIA. Yogyakarta
- Alvina Sabah Idrees dan M Wasif Siddiqi, 2013, Does Public Education Expenditure cause Economic Growth ? Comparison of Development and Developed and Developing Countries, *Pakistan journal of Commerce and social Scial Science* Vol 7(1), 174-183.
- Ali Aulieman Al Shatti, 2014, The Impact of Public Expenditure on economic Growth in Jordan, *International Journal of economics and Finance*, Vol 6 no 10 2014 P. 157-167.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2013, Iktishar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2013.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2014, Iktishar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2014.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Indonesia Tahun 2016
- Badan Pusat Statistik Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009-2013.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009-2013.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*, Third Edition. The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England: John Wiley & Sons Ltd.

- Barro, R. J, 2000. 'Inequality and Growth in a Panel of Countries', *Journal of Economic Growth*, Vol. 5, No. 1.
- ,1989, "A Cross-Country Study of Growth, Saving, and Government," *National Bureau of Economic Research*, working paper No. 2855, February 1989.
- ,1990, "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth," *Journal of Political Economy*, XCVIII 1990, S103-25.
- , and Gary S. Becker,1989, "Fertility Choice in a Model of Economic Growth," *Econometrica*, LVII (1989), 481-501.
- , and Xavier Sala i Martin, 1990, "Economic Growth and Convergence across the United States," *National Bureau of Economic Research*, working paper, July 1990.
- , and Holger C. Wolf, 1989. "Data Appendix for Economic Growth in a Cross Section of Countries," unpublished, National Bureau of Economic Research, November 1989.
- Bardhan, Pranab. 1997, "The Role Of Government in Economic Development: A Political Economic Approach." *OECD Development Centre*, Paris.
- Basem Mohammad Louzi & Abeer Abadi, 2011, The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Jordan, *IJRRAS* 8(2) p.253-258
- Bastian, Indra, 2006, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu ekonomi, Edisi 1, Cetakan Ke 5, BPFE, Jogjakarta.
- Cheng, Hsiao. 2006. *Panel Data Analysis-Advantages and Challenges*. IEPR Working Paper 06.49. University of Southern California. California
- Cheng, Hsiao. 2006. *Why Data Panel?*. IEPR Working Paper 05.33. University of Southern California. California
- Chiawa, M.M. dkk 2012, Cointegration and causality Analisis og Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, *International Journal of Scientific and technology Research Vol 1, issue 8, p.163-174*
- Daniel O. Abala, 2014, foreign Direct Investment and economic Growth : An empirical Analysis of Kenyan data, *DBA Africa Management Review* April 2014. No. 1. P.62-83.

- David E. Bloom, dkk, 2010, The contribution of population health and demographic change to economic growth in China and India, *Journal of Comparative Economics* 38 p. 17–33
- Ebaidalle Mahjoub Ebaidalla, 2013, Causality between Government Expenditure and national Income Evidence From Sudan, *Journal of Economic Cooperation and Development* 4 p.61-76
- Ergun Dogur dkk, 2006, Government Expenditure and National Income : causality Test for Five South East Asian Countries, *International Journal Business & Economics research*, vol 5 No 10, oct 2006, P.49-58
- Gaurav Agrawal, 2015, Foreign Direct Investment and Economic Growth in BRICS Economies : A panel data analisis, *Journal of Economic and Business and management*. Vo. 3 No 4 P.421-424
- Greene, W.H. (2000), “*Econometrics Analysis*” 3th edition. Prentice Hall. New Jersey.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics* Fourth Edition. New York: TheMcGrow Hill Companies Inc
- Houssein Radodi & Hichem Saidi, 2011, The Impact of Foreign Direct Investment of Economic Growth in Developing and Developed Economics., *Interdisciplinnary Journal of research in Business*. Vol 1, issue 6 Juni 2011. P.10-17.
- Jhon Loizides, 2005, Government Expenditure and economic Growth : Evidence from Trivariate Causality Granger, *Journal of Applied Ecomics* Vol VIII, No 1. P. 125-152
- John Njenga Muthui dkk, 2013, The impact of Public Expenditure Component on economic Growth in Kenya 1964-2011, *International Journal of business and social Science*. Vol.4 no 4. April 2013 p. 233-254
- Jokumbo S dkk, 2010, Foreign Private Investment and economic Growth in Nigeria, *Appllied Econometrics and International Development* Vol 10-2. P .189-204
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2014, Deskripsi dan Analisis APBD 2014.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2010, Data APBD tahun 2010
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2011, Data APBD tahun 2011
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2012, Data APBD tahun 2012
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2013, Data APBD tahun 2013

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2014, Data APBD tahun 2014
- Kevin Sylwester, 2000, Income inequality, education expenditures, and growth, *Journal of Development Economics* Vol. 63 _2000. 379–398
- Klevmarke, N. A. 1989, Panel Studies : What Can We Learn from Them ? Introduction. *European Economic Review*, 33 : 523-529.
- Kwabena Gyimah Brempong, 2002, Corruption, economic growth and income inequality in Africa, *Econ. Gov.* (2002) 3, P. 183-209
- Leonid Melnyk dkk, 2014, The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth case of Post Communication Transition Economies, *Problem and Perspective in Management*, Vol 12 issue I, 2014 P.18-24.
- Leibenstein, harvey. 1974, "An Interpretation of The Economic Theory of Fertility: Promosing Path or Blind Alley?" *Journal of Economic Literature*, (12(2)). January 1974, 457-465.
- Lincolin Arsyad, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta
- Matthew Abiodun Dada, 2013, Composition Effect of Government Expenditure on Private Consumption and Output Growth in Nigeria : a Single Equation Error correction Modelling, *Rumanian Journal of fiscal policy*, Vol. 4, issue 2(7), July-Des 2013, P. 18-34
- Meuro, 1995, Corruption and Growth, *Quarterly Journal of Economic*, 110 p. 681-712
- Mudrajad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan*, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro, 2005,. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Murphy, Kevin M., Shleifer, Andrei, & Vishny, Robert W, 1993, Why is rent seeking so cost to growth, *The American Economic Review* Vol 83 No. 2.
- Naftaly Gisore, 2014, Effect of government Expenditure on economic Growth in East Africa : A Disaggregate Model, *European Journal of Business and Social Science*. Vol. 3 no 8. P. 289-304.
- Nelson, R. R. 1956, A theory of the low level equilibrium trap in underdeveloped economies, *American Economic Review*, 46; 894-908.

- N. Gregory Mankiw, David Romer, David N. Weil, 1992, A Contribution to the Empirics of Economic Growth, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 107, No. 2 (May, 1992), pp. 407-437
- Nuno Carles Leitaó & Saeed RASEKHI, 2013, The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth The Portuguese experience, *Theoretical and Applied Economics* Vol XX No 1 (578). P.51-62
- Nwarji, 2012, effect of public Export on economic Growth in Nigeria : A Diaaggreagted Time series analysis, *International journal of management Science and research* Vol 1 issue 7. P.1-15
- Oni, dkk (2014), Joint Effects of Capital and Recurrent Expenditure in Nigerian's Economic Growth, *Eropean journal of Globalization and Development Research*, Vol 9, No 1. P. 530-543
- Pak Hung Mo, 2001, Corruption and Economic Growth, *Journal of comparative Economic* 29, P. 66-79.
- Paolo Mauro, 1995, Corruption and Growth, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110, No. 3 (Aug., 1995), pp. 681-712.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2011
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2012
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2013
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2014
- P. Srinivasan, 2013, causality between Public Expenditure and Economic Grotwh: the India Case, *International Journal of Economic an management* 7(2), P.335-347
- Sadono Sukirno, 2006, *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, cetakan ketiga, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Suryana, 2000, *Ekonomi Pembangunan problematika dan pendekatan*, Edisi Pertama, Salemba Empat.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001, *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Todaro, Michael P., 2000, *Economic Development in the Third World*, (6th ed.), London: Addison Wesley Longman.
- Rikwan ES manik & Paidi Hidayat, 2010, Analisis kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Sumatera utara (Metode Cointegration Test dan Granger causality Test), *Jurnal keuangan dan bisnis* Vol 2 No 1 Maret 2010, hal. 46-56
- Rock-Antoine Mehanna, 1990, The Temporal Causality Between Investment And Growth In Developing Economies, *Journal Of Business And Economics Research* Volume 1, Number 3, p. 85-91.
- Sauwaluck Koojaroenprasit, 2011, The Impact of foreign Direct Investment on Economic Growth A Case Study of South Korea, *International Journal of Business and Social Science*, Vol 3 no 21. P.8-19.
- Serdar Kurt, 2015, Government Health Expenditure and economic Growth : A Feder Ram Approach for the case of Turkey, *International Journal of economics and Financial Issues*, 5(2). P. 441-447
- Sukirno, 2007. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Penerbit Kencana Prenada Media Group; Jakarta.
- Suleiman A.S. Aruwa, 2012, Public finances and economic growth in Nigeria, *Public and Municipal Finance*, Volume 1, Issue 2, 2012, pp. 29-36
- Sumitro Djojohadikusumo. 1994. “*Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar. Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*”. LP3ES. PT. Ikrar Mandiri abadi. Jakarta
- Vijay LNG dan honey Gupta, 2013, Public Expenditure and Economic Growth a case Study of india, *Global Journal of management and Business Study*, Vol. 3, No 2 (2013). PP. 191-196
- Yusuf Wibisono. 2005. *Metode Statistika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zafar Ahmad Sultan & Md Imdadul Haque, 2011, the Estimation of the Cointegration Relationship between Growth, Domestic Investment and Export : *The indian Economy*, *International Journal of Economics and Finance*, Vol 3 No 4 September 2011. P. 226-232.
- Zuzana Sakarupova, 2014, A Causa Relationship between Foreign Direct Investment, Economic Growth, and Export for Slovakia, *Procedia Economics and Finance* 15 p. 123-128

LAMPIRAN

No	PROPINSI	Tahun	PDRB (2000=100)	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Pendidikan	Pengeluaran Kesehatan	PP Kelautan dan Perikanan	Pengeluaran Pertanian	DAU	PMA	Opini
1	N Aceh D	2010	33,103,000	4,531,500	934,427	710,433	128,029	295,091	621,432	41,050	3
		2011	34,705,000	4,622,200	898,432	798,871	126,341	262,328	716,646	203,626	3
		2012	36,488,000	4,711,680	906,936	895,106	164,610	328,564	911,080	1,665,878	3
		2013	38,013,000	4,801,840	638,365	886,579	299,537	753,582	1,292,445	1,147,788	3
		2014	39,705,500	4,917,900	1,272,862	1,090,270	257,550	585,263	1,201,612	387,288	3
2	SUMUT	2010	118,719,000	13,022,100	238,109	205,169	32,199	141,240	792,119	1,628,419	3
		2011	126,568,000	13,635,893	100,426	229,811	55,743	162,335	948,867	6,834,565	3
		2012	134,462,000	13,822,861	362,873	263,492	72,413	178,793	1,103,389	6,240,262	3
		2013	142,537,000	13,584,480	239,707	297,944	89,082	192,783	1,223,445	10,817,133	3
		2014	150,408,500	13,770,120	206,114.00	401,700.37	80,821.44	210,476	1,349,132	6,852,389	3
3	RIAU	2010	97,736,000	5,580,900	483,606	271,676	40,085	214,748	58,869	778,919	5
		2011	102,666,000	5,783,800	346,600	295,892	40,054	125,797	380,051	1,925,486	3
		2012	106,299,000	5,973,036	461,690	417,426	38,024	180,621	489,179	11,148,107	3
		2013	109,073,000	6,020,960	466,407	538,821	61,098	300,504	726,630	15,905,960	4
		2014	113,354,500	6,178,900	531,059.79	558,364.92	98,009.77	324,810	820,984	17,037,387	4
4	SUM SEL	2010	63,859,000	7,488,900	562,557	420,049	14,289	94,783	507,356	1,674,885	3

No	PROPINSI	Tahun	PDRB (2000=100)	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Pendidikan	Pengeluaran Kesehatan	PP Kelautan dan Perikanan	Pengeluaran Pertanian	DAU	PMA	Opini
		2011	68,008,000	7,522,973	210,865	296,520	21,100	94,260	646,813	5,053,809	3
		2012	72,096,000	7,621,827	244,650	266,016	26,069	105,631	716,153	7,604,957	3
		2013	76,410,000	7,837,200	273,713	176,775	41,752	174,571	870,516	5,922,909	3
		2014	80,528,500	7,944,300	261,199.40	269,581.91	41,420.91	194,256	985,542	13,143,052	3
5	BENGKULU	2010	8,340,000	1,717,200	66,956	144,555	13,315	61,029	523,041	225,475	3
		2011	8,879,000	1,724,653	61,106	162,300	11,686	55,870	607,388.00	390,428	3
		2012	9,465,000	1,744,273	116,211	194,108	12,694	65,524	775,311.00	294,268	5
		2013	10,052,000	1,816,240	130,423	219,206	18,621	110,570	854,647.00	272,054	5
		2014	10,614,500	1,841,060	138,889.21	226,134.52	22,586.85	99,118	955,095.00	240,307	5
6	JATENG	2010	186,993,000	32,436,000	283,958	740,701	44,833	188,687	1,168,788	531,640	3
		2011	198,270,000	33,176,587	264,582	922,091	64,806	236,521	1,276,180.00	1,586,582	4
		2012	210,848,000	33,278,768	257,218	973,038	72,731	269,249	1,516,892.00	2,335,427	5
		2013	223,100,000	33,264,560	271,397	1,248,836	85,337	330,147	1,670,859.00	5,659,317	4
		2014	235,027,500	33,517,380	271,212.58	1,625,097.87	82,121.37	364,642	1,803,931.00	5,764,206	5
7	KALSEL	2010	30,675,000	3,649,050	302,257	241,106	28,736	108,081	483,365	1,817,710	3
		2011	32,553,000	3,694,533	353,395	361,747	33,302	107,691	504,876.00	2,466,973	3
		2012	34,413,000	3,756,957	171,115	485,830	27,081	133,036	652,535.00	2,633,057	3

No	PROPINSI	Tahun	PDRB (2000=100)	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Pendidikan	Pengeluaran Kesehatan	PP Kelautan dan Perikanan	Pengeluaran Pertanian	DAU	PMA	Opini
		2013	36,196,000	3,856,400	361,429	689,024	49,650	176,222	683,511.00	3,176,688	3
		2014	38,065,000	3,934,320	422,201.45	1,021,095.71	49,140.07	195,981	701,725.00	6,250,996	5
8	KALTIM	2010	110,953,000	3,577,500	325,103	655,609	43,619	160,391	49,108.50	9,820,211	3
		2011	115,490,000	3,571,920	272,555	636,232	44,472	128,737	51,446.00	5,462,904	3
		2012	120,086,000	3,699,931	308,031	807,169	58,012	180,961	52,637.00	19,476,202	5
		2013	121,990,000	3,881,280	588,007	1,154,193	82,423	235,864	55,539.00	16,277,052	5
		2014	126,556,500	3,354,260	663,839.58	964,480.37	100,768.42	306,072	57,312.00	26,692,074	5
9	SULUT	2010	18,377,000	2,265,750	63,983	61,959	14,289	61,403	558,635	2,039,061	5
		2011	19,735,000	2,295,773	85,940	90,580	21,620	69,568	619,711.00	1,996,575	3
		2012	21,287,000	2,315,407	88,551	96,126	30,109	90,948	790,534.00	451,124	4
		2013	22,872,000	2,363,600	85,124	122,589	31,442	105,510	885,684.00	800,897	4
		2014	24,327,000	2,395,900	78,026.43	176,890.74	47,146.78	108,063	949,852.00	1,224,729	5
10	SULTENG	2010	17,624,000	2,647,350	65,149	110,723	15,507	54,218	659,331	1,244,811	3
		2011	19,231,000	2,698,300	70,244	176,835	29,204	75,006	743,161.00	3,358,403	3
		2012	21,008,000	2,748,480	79,083	166,022	51,915	133,846	902,087.00	7,799,155	4
		2013	22,979,000	2,786,560	103,487	179,235	60,915	197,416	981,035.00	10,421,990	3
		2014	24,671,000	2,824,640	110,089.47	199,809.84	71,457.11	196,758	1,053,636.00	18,587,384	4

No	PROPINSI	Tahun	PDRB (2000=100)	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Pendidikan	Pengeluaran Kesehatan	PP Kelautan dan Perikanan	Pengeluaran Pertanian	DAU	PMA	Opini
11	NTB	2010	20,073,000	4,507,650	22,610	149,740	18,726	62,236	602,389	1,982,818	1
		2011	19,533,000	4,577,027	16,679	199,858	21,766	69,334	646,671.00	4,217,308	5
		2012	19,319,000	4,628,988	30,065	196,141	33,708	105,251	809,617.00	6,148,089	5
		2013	20,417,000	4,702,320	30,153	226,980	31,178	113,256	859,353.00	5,950,269	5
		2014	21,515,000	4,766,580	38,993.55	392,967.07	31,961.12	154,690	980,300.00	6,856,072	5
12	NTT	2010	12,547,000	4,698,450	74,659	132,010	14,806	76,536	674,636	34,450	3
		2011	13,252,000	4,891,627	74,474	142,069	19,716	65,996	940,646.00	49,798	3
		2012	13,970,000	4,999,765	81,341	165,695	31,477	82,148	940,646.00	84,358	3
		2013	14,746,000	4,951,120	72,066	177,060	38,053	105,099	1,003,991.00	120,062	3
		2014	15,457,500	5,044,000	49,538.87	198,569.83	52,837.09	98,588	1,131,687.00	187,564	3
13	Maluku	2010	4,251,000	1,550,250	132,458	87,061	21,994	36,987	607,572	25,974	1
		2011	4,509,000	1,484,267	130,959	113,786	40,623	41,349	703,993.00	106,056	1
		2012	4,861,000	1,519,993	85,146	117,855	50,187	46,525	829,491.00	82,370	1
		2013	5,111,000	1,617,200	83,478	159,181	48,913	62,077	897,657.00	643,157	3
		2014	5,416,000	1,664,520	117,347.69	200,617.79	74,391.99	84,198	1,019,704.00	163,009	3
14	PAPUA	2010	22,400,000	2,862,000	239,265	443,938	31,337	81,198	1,058,228	2,963,515	1
		2011	21,208,000	2,403,867	249,232	475,364	42,133	97,380	1,276,285.00	11,897,666	1

No	PROPINSI	Tahun	PDRB (2000=100)	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Pendidikan	Pengeluaran Kesehatan	PP Kelautan dan Perikanan	Pengeluaran Pertanian	DAU	PMA	Opini
		2012	21,436,000	2,441,804	189,072	575,941	46,031	104,556	1,569,782.00	11,627,523	1
		2013	24,617,000	3,035,360	181,773	672,966	52,772	144,383	1,889,267.00	28,766,078	3
		2014	24,135,000	3,102,060	88,724.34	649,772.37	45,796.41	137,703	1,991,202.00	15,681,908	3
15	MALUT	2010	3,036,000	1,049,400	34,374	57,959	20,000	11,133	479,727	2,211,824	1
		2011	3,230,000	1,064,800	14,567	65,664	12,730	18,584	540,389.00	1,177,424	1
		2012	3,446,000	1,094,484	24,357	67,476	20,608	32,543	703,159.00	872,753	1
		2013	3,656,000	1,119,600	32,850	90,429	23,184	42,571	772,591.00	3,272,344	1
		2014	3,861,000	1,134,900	39,993.64	113,277.47	26,763.46	49,843	906,623.00	1,227,971	1
16	BANTEN	2010	88,552,000	10,684,800	165,482	203,800	14,710	30,879	381,979	13,883,799	3
		2011	94,198,000	10,588,307	190,857	270,394	26,961	37,862	460,333.00	19,692,903	3
		2012	99,992,000	10,826,453	222,814	228,645	24,849	41,628	530,833.00	26,266,270	3
		2013	105,856,000	11,444,800	278,448	382,492	14,090	59,140	671,081.00	45,345,901	1
		2014	111,576,000	11,702,080	308,400.00	395,090.50	17,184.00	84,973	728,490.00	25,310,761	3
17	PAPUA BARAT	2010	9,361,000	775,125	81,358	91,773	28,781	28,647	605,900	154,253	1
		2011	11,890,000	793,760	77,108	71,846	35,136	28,874	700,444.00	300,033	1
		2012	13,780,000	812,274	82,056	87,962	41,471	35,609	901,398.00	309,779	1
		2013	15,062,000	821,040	81,657	82,906	44,438	47,547	1,064,872.00	660,097	1

No	PROPINSI	Tahun	PDRB (2000=100)	Jumlah Penduduk	Pengeluaran Pendidikan	Pengeluaran Kesehatan	PP Kelautan dan Perikanan	Pengeluaran Pertanian	DAU	PMA	Opini
		2014	17,271,500	857,480	126,710.79	172,643.01	99,036.75	77,903	1,122,264.00	1,907,648	1
18	SULBAR	2010	4,744,000	1,168,650	29,627	38,323	10,159	34,778	405,750	335,801	3
		2011	5,233,000	1,210,000	27,431	27,500	17,611	47,070	441,578.00	50,931	3
		2012	5,704,000	1,227,000	42,505	39,141	20,528	71,545	590,680.00	2,210	3
		2013	6,113,000	1,244,000	35,300	50,404	33,160	82,022	685,497.00	30,691	3
		2014	6,593,000	1,261,000	45,401.65	77,635.90	53,707.71	85,646	776,214.00	201,929	3

Sumber : BPS, Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan LKPD (Berbagai Terbitan)

MODEL COMMON EFFECT

Dependent Variable: LOG(PDRB?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 05/11/16 Time: 21:43

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 18

Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JP?)	0.874787	0.060612	14.43257	0.0000
LOG(PEDU?)	0.360223	0.069510	5.182322	0.0000
LOG(PKES?)	-0.252884	0.093297	-2.710520	0.0082
LOG(PKEL?)	0.142634	0.100167	1.423963	0.1583
LOG(PPERT?)	0.166637	0.132799	1.254814	0.2131
LOG(DAU?)	-0.227566	0.048809	-4.662353	0.0000
LOG(PMA?)	0.167081	0.023529	7.100970	0.0000
OPINI?	0.007336	0.044660	0.164256	0.8699
R-squared	0.917027	Mean dependent var	17.14372	
Adjusted R-squared	0.909944	S.D. dependent var	1.203000	
S.E. of regression	0.361012	Akaike info criterion	0.884876	
Sum squared resid	10.68703	Schwarz criterion	1.107082	
Log likelihood	-31.81943	Hannan-Quinn criter.	0.974482	
Durbin-Watson stat	0.358211			

MODEL FIXED EFFECT

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 05/11/16 Time: 21:37
 Sample: 2010 2014
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 18
 Total pool (balanced) observations: 90
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.593023	1.361163	5.578337	0.0000
LOG(JP?)	0.443728	0.096728	4.587359	0.0000
LOG(PEDU?)	-0.017859	0.011527	-1.549239	0.1263
LOG(PKES?)	0.051847	0.014366	3.609075	0.0006
LOG(PKEL?)	0.087515	0.009998	8.752836	0.0000
LOG(PPERT?)	0.087475	0.015670	5.582123	0.0000
LOG(DAU?)	0.041599	0.023221	1.791396	0.0780
LOG(PMA?)	-0.003170	0.002888	-1.097509	0.2765
OPINI?	-0.011929	0.005130	-2.325246	0.0232
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	-0.152194			
_SUMUT--C	0.889099			
_RIAU--C	1.066045			
_SUMSEL--C	0.642718			
_BENGKULU--C	-0.637459			
_JATENG--C	0.828252			
_KALSEL--C	0.162107			
_KALTIM--C	1.443548			
_SULUT--C	0.021756			
_SULTENG--C	-0.158726			
_NTB--C	-0.401041			
_NTT--C	-0.790735			
_MALUKU--C	-1.331269			
_PAPUA--C	-0.172485			
_MALUT--C	-1.373841			
_BANTEN--C	0.929751			
_PAPUABAR--C	-0.008162			
_SULBAR--C	-0.957361			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.999712	Mean dependent var	30.26517
Adjusted R-squared	0.999600	S.D. dependent var	15.32404
S.E. of regression	0.046576	Sum squared resid	0.138836
F-statistic	8886.339	Durbin-Watson stat	1.673814
Prob(F-statistic)	0.000000		

MODEL RANDOM EFFECT

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 05/11/16 Time: 21:39

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 18

Total pool (balanced) observations: 90

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.678197	1.339923	0.506146	0.6141
LOG(JP?)	0.932107	0.093540	9.964765	0.0000
LOG(PEDU?)	0.015832	0.021943	0.721488	0.4727
LOG(PKES?)	0.044550	0.029561	1.507058	0.1357
LOG(PKEL?)	0.096766	0.024224	3.994674	0.0001
LOG(PPERT?)	0.077440	0.029241	2.648325	0.0097
LOG(DAU?)	-0.025898	0.025379	-1.020433	0.3106
LOG(PMA?)	0.008910	0.007759	1.148470	0.2542
OPINI?	-0.021423	0.008225	-2.604619	0.0109
Random Effects				
(Cross)				
_ACEH--C	-0.285879			
_SUMUT--C	0.257371			
_RIAU--C	0.755859			
_SUMSEL--C	0.256914			
_BENGKULU--C	-0.222970			
_JATENG--C	-0.189311			
_KALSEL--C	0.121960			
_KALTIM--C	1.240612			
_SULUT--C	0.283863			
_SULTENG--C	0.007392			
_NTB--C	-0.444782			
_NTT--C	-0.848045			
_MALUKU--C	-0.881228			
_PAPUA--C	-0.011085			
_MALUT--C	-0.756783			
_BANTEN--C	0.326819			
_PAPUABAR--C	0.740959			
_SULBAR--C	-0.351668			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.403625	0.9854
Idiosyncratic random			0.049173	0.0146
Weighted Statistics				
R-squared	0.785981	Mean dependent var		0.932654
Adjusted R-squared	0.764843	S.D. dependent var		0.114208
S.E. of regression	0.055383	Sum squared resid		0.248449
F-statistic	37.18388	Durbin-Watson stat		1.020978
Prob(F-statistic)	0.000000			

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: MINIRISET

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	29.752435	8	0.0002

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(JP?)	0.593904	0.932107	0.027524	0.0415
LOG(PEDU?)	-0.002214	0.015832	0.000029	0.0009
LOG(PKES?)	0.044353	0.044550	0.000029	0.9709
LOG(PKEL?)	0.094351	0.096766	0.000008	0.3827
LOG(PPERT?)	0.086466	0.077440	0.000052	0.2124
LOG(DAU?)	0.012633	-0.025898	0.000097	0.0001
LOG(PMA?)	0.002249	0.008910	0.000002	0.0000
OPINI?	-0.015927	-0.021423	0.000004	0.0038

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(PDRB?)

Method: Panel Least Squares

Date: 10/31/16 Time: 01:18

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 18

Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.492367	2.712737	2.024658	0.0471
LOG(JP?)	0.593904	0.190457	3.118306	0.0027
LOG(PEDU?)	-0.002214	0.022604	-0.097946	0.9223
LOG(PKES?)	0.044353	0.030051	1.475933	0.1449
LOG(PKEL?)	0.094351	0.024381	3.869807	0.0003
LOG(PPERT?)	0.086466	0.030124	2.870356	0.0056
LOG(DAU?)	0.012633	0.027228	0.463977	0.6442
LOG(PMA?)	0.002249	0.007894	0.284890	0.7766
OPINI?	-0.015927	0.008441	-1.886791	0.0637

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998799	Mean dependent var	17.14372
Adjusted R-squared	0.998329	S.D. dependent var	1.203000
S.E. of regression	0.049173	Akaike info criterion	-2.950111
Sum squared resid	0.154748	Schwarz criterion	-2.227944
Log likelihood	158.7550	Hannan-Quinn criter.	-2.658891
F-statistic	2128.207	Durbin-Watson stat	1.286854
Prob(F-statistic)	0.000000		

REDUNDANT TEST

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: MINIRISET

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	465.830979	(17,64)	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(PDRB?)

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 10/31/16 Time: 01:21

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 18

Total pool (balanced) observations: 90

Use pre-specified GLS weights

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.965664	0.789142	1.223688	0.2246
LOG(JP?)	0.872011	0.047871	18.21591	0.0000
LOG(PEDU?)	0.265545	0.055140	4.815848	0.0000
LOG(PKES?)	-0.271151	0.066033	-4.106280	0.0001
LOG(PKEL?)	-0.084079	0.066273	-1.268683	0.2082
LOG(PPERT?)	0.534917	0.087371	6.122334	0.0000
LOG(DAU?)	-0.335208	0.060756	-5.517304	0.0000
LOG(PMA?)	0.158270	0.013733	11.52523	0.0000
OPINI?	0.022788	0.035433	0.643150	0.5219

Weighted Statistics

R-squared	0.964076	Mean dependent var	30.26517
Adjusted R-squared	0.960528	S.D. dependent var	15.32404
S.E. of regression	0.462387	Sum squared resid	17.31791
F-statistic	271.7198	Durbin-Watson stat	0.917594
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.892006	Mean dependent var	17.14372
Sum squared resid	13.90982	Durbin-Watson stat	0.298412

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Dependent Variable: LOG((RESID?)^2)

Method: Pooled Least Squares

Date: 10/31/16 Time: 01:10

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 18

Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-72.69606	120.5522	-0.603026	0.5486
LOG(JP?)	4.601519	8.463788	0.543671	0.5886
LOG(PEDU?)	-0.708492	1.004492	-0.705324	0.4832
LOG(PKES?)	1.742465	1.335434	1.304793	0.1966
LOG(PKEL?)	-0.136896	1.083485	-0.126348	0.8999
LOG(PPERT?)	-0.724817	1.338679	-0.541442	0.5901
LOG(DAU?)	-0.444750	1.209997	-0.367563	0.7144
LOG(PMA?)	-0.147989	0.350783	-0.421881	0.6745
OPINI?	-0.134313	0.375123	-0.358051	0.7215
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	0.064132			
_SUMUT--C	-5.073564			
_RIAU--C	0.426046			
_SUMSEL--C	-4.122177			
_BENGKULU--C	2.453402			
_JATENG--C	-10.48922			
_KALSEL--C	-0.818684			
_KALTIM--C	-0.174762			
_SULUT--C	2.942516			
_SULTENG--C	2.776157			
_NTB--C	-0.326971			
_NTT--C	-4.424340			
_MALUKU--C	3.543593			
_PAPUA--C	0.402809			
_MALUT--C	4.419937			
_BANTEN--C	-5.521731			
_PAPUABAR--C	10.34972			
_SULBAR--C	3.573139			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.388262	Mean dependent var	-8.178292
Adjusted R-squared	0.149301	S.D. dependent var	2.369202
S.E. of regression	2.185194	Akaike info criterion	4.638137
Sum squared resid	305.6047	Schwarz criterion	5.360305
Log likelihood	-182.7162	Hannan-Quinn criter.	4.929358
F-statistic	1.624795	Durbin-Watson stat	2.992848
Prob(F-statistic)	0.061573		

UJI MULTIKOLINEARITAS

Dependent Variable: LOG(PDRB?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/11/16 Time: 21:43
 Sample: 2010 2014
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 18
 Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JP?)	0.874787	0.060612	14.43257	0.0000
LOG(PEDU?)	0.360223	0.069510	5.182322	0.0000
LOG(PKES?)	-0.252884	0.093297	-2.710520	0.0082
LOG(PKEL?)	0.142634	0.100167	1.423963	0.1583
LOG(PPERT?)	0.166637	0.132799	1.254814	0.2131
LOG(DAU?)	-0.227566	0.048809	-4.662353	0.0000
LOG(PMA?)	0.167081	0.023529	7.100970	0.0000
OPINI?	0.007336	0.044660	0.164256	0.8699
R-squared	0.917027	Mean dependent var		17.14372
Adjusted R-squared	0.909944	S.D. dependent var		1.203000
S.E. of regression	0.361012	Akaike info criterion		0.884876
Sum squared resid	10.68703	Schwarz criterion		1.107082
Log likelihood	-31.81943	Hannan-Quinn criter.		0.974482
Durbin-Watson stat	0.358211			

UJI REGRESI ANTAR VARIABEL BEBAS

Dependent Variable: LOG(JP?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 10/31/16 Time: 01:25
 Sample: 2010 2014
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 18
 Total pool (balanced) observations: 90
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PEDU?)	0.168779	0.085684	1.969770	0.0522
LOG(PKES?)	0.460629	0.108392	4.249641	0.0001
LOG(PKEL?)	-0.641254	0.103029	-6.223991	0.0000
LOG(PPERT?)	0.640437	0.150796	4.247049	0.0001
LOG(DAU?)	0.440384	0.042255	10.42215	0.0000
LOG(PMA?)	0.066211	0.028452	2.327109	0.0224
OPINI?	-0.018322	0.052243	-0.350714	0.7267
R-squared	0.754678	Mean dependent var		20.99596
Adjusted R-squared	0.736944	S.D. dependent var		10.58820
S.E. of regression	0.629965	Sum squared resid		32.93902
Durbin-Watson stat	0.412629			

Dependent Variable: LOG(PEDU?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 10/31/16 Time: 01:27
Sample: 2010 2014
Included observations: 5
Cross-sections included: 18
Total pool (balanced) observations: 90
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JP?)	0.218836	0.076225	2.870908	0.0052
LOG(PKES?)	0.676987	0.086317	7.843026	0.0000
LOG(PKEL?)	0.133144	0.121666	1.094347	0.2770
LOG(PPERT?)	0.281603	0.156315	1.801505	0.0753
LOG(DAU?)	-0.219273	0.055854	-3.925816	0.0002
LOG(PMA?)	-0.068220	0.022307	-3.058208	0.0030
OPINI?	-0.180803	0.057543	-3.142054	0.0023
R-squared	0.843460	Mean dependent var		15.60789
Adjusted R-squared	0.832144	S.D. dependent var		6.987063
S.E. of regression	0.556382	Sum squared resid		25.69355
Durbin-Watson stat	0.751560			

Dependent Variable: LOG(PKES?)
Method: Pooled Least Squares
Date: 10/31/16 Time: 01:30
Sample: 2010 2014
Included observations: 5
Cross-sections included: 18
Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JP?)	0.156441	0.069212	2.260318	0.0264
LOG(PEDU?)	0.322264	0.073732	4.370723	0.0000
LOG(PKEL?)	0.095930	0.117375	0.817294	0.4161
LOG(PPERT?)	0.359942	0.151160	2.381200	0.0195
LOG(DAU?)	-0.029724	0.057331	-0.518467	0.6055
LOG(PMA?)	0.099924	0.025417	3.931446	0.0002
OPINI?	0.008472	0.052534	0.161272	0.8723
R-squared	0.797723	Mean dependent var		12.39848
Adjusted R-squared	0.783100	S.D. dependent var		0.911978
S.E. of regression	0.424731	Akaike info criterion		1.199867
Sum squared resid	14.97293	Schwarz criterion		1.394296
Log likelihood	-46.99399	Hannan-Quinn criter.		1.278272
Durbin-Watson stat	0.310385			

Dependent Variable: LOG(PPERT?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 10/31/16 Time: 01:33
 Sample: 2010 2014
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 18
 Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JP?)	0.088636	0.049145	1.803562	0.0749
LOG(PEDU?)	0.131920	0.055599	2.372724	0.0200
LOG(PKEL?)	0.492626	0.062696	7.857432	0.0000
LOG(PKES?)	0.177657	0.074608	2.381200	0.0195
LOG(DAU?)	0.067093	0.039665	1.691475	0.0945
LOG(PMA?)	-0.019999	0.019324	-1.034957	0.3037
OPINI?	0.206069	0.029172	7.063952	0.0000
R-squared	0.857718	Mean dependent var	11.53725	
Adjusted R-squared	0.847433	S.D. dependent var	0.763939	
S.E. of regression	0.298393	Akaike info criterion	0.493779	
Sum squared resid	7.390208	Schwarz criterion	0.688208	
Log likelihood	-15.22005	Hannan-Quinn criter.	0.572184	
Durbin-Watson stat	0.848098			

Dependent Variable: LOG(DAU?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 10/31/16 Time: 01:34
 Sample: 2010 2014
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 18
 Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JP?)	0.714167	0.111510	6.404507	0.0000
LOG(PEDU?)	-0.517896	0.145614	-3.556649	0.0006
LOG(PKEL?)	0.585001	0.215913	2.709435	0.0082
LOG(PKES?)	-0.108604	0.209471	-0.518467	0.6055
LOG(PPERT?)	0.496659	0.293625	1.691475	0.0945
LOG(PMA?)	-0.050273	0.052625	-0.955310	0.3422
OPINI?	-0.360358	0.092316	-3.903509	0.0002
R-squared	-0.051586	Mean dependent var	13.42072	
Adjusted R-squared	-0.127604	S.D. dependent var	0.764542	
S.E. of regression	0.811857	Akaike info criterion	2.495603	
Sum squared resid	54.70634	Schwarz criterion	2.690032	
Log likelihood	-105.3021	Hannan-Quinn criter.	2.574008	
Durbin-Watson stat	0.264825			

Dependent Variable: LOG(PMA?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 10/31/16 Time: 01:35

Sample: 2010 2014

Included observations: 5

Cross-sections included: 18

Total pool (balanced) observations: 90

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(JP?)	0.603821	0.274878	2.196684	0.0308
LOG(PEDU?)	-0.392864	0.321384	-1.222413	0.2250
LOG(PKEL?)	0.063499	0.467227	0.135906	0.8922
LOG(PKES?)	1.571052	0.399612	3.931446	0.0002
LOG(PPERT?)	-0.637065	0.615547	-1.034957	0.3037
LOG(DAU?)	-0.216334	0.226454	-0.955310	0.3422
OPINI?	-0.034671	0.208305	-0.166445	0.8682

R-squared	0.344749	Mean dependent var	14.27501
Adjusted R-squared	0.297381	S.D. dependent var	2.009159
S.E. of regression	1.684125	Akaike info criterion	3.954956
Sum squared resid	235.4110	Schwarz criterion	4.149385
Log likelihood	-170.9730	Hannan-Quinn criter.	4.033361
Durbin-Watson stat	0.327596		
